

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Teori**

Dalam isi Kajian teori penulis menguraikan konsep-konsep yang relevan selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah. Dan teori yang penulis sertakan terkait, Penanaman Nilai-Nilai Keislaman Melalui Kaderisasi Pendidikan Politik di Masyarakat Kota Bandung. Berikut Uraiannya:

#### **2.2 Konsep Keislaman**

##### **2.2.1 Pengertian Nilai-Nilai Islam**

Kata "*value*" berasal dari bahasa Latin *valere* atau bahasa Prancis Kuno *Valioir*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut diterjemahkan sebagai "nilai". Secara donatif, "*value*" atau "nilai" dapat diartikan sebagai harga. Menurut Webster (Dalam Akbar. 2013. hlm. 10), Nilai merupakan suatu prinsip, tolok ukur, atau karakteristik yang dianggap penting atau diharapkan. Oleh karena itu, nilai-nilai ini penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Penilaian adalah pandangan atau asumsi yang menjadi landasan bagi individu atau kelompok saat menentukan pilihan atau menilai hal-hal yang signifikan atau tidak dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif lain, Nilai merujuk pada sekumpulan pandangan atau emosi yang dianggap sebagai bagian dari diri seseorang yang memberikan ciri khas pada cara berpikir, perasaan, interaksi, dan perilaku individu. Maka, sistem nilai bisa menjadi pedoman umum yang diterima, yang bersumber dari kondisi obyektif atau didasarkan pada keyakinan, perasaan, dan identitas yang diberikan atau diwahyukan oleh Allah Ta'ala.

Menurut Zakiyah Darajat (dalam Zaki, 2019, hlm. 17), Nilai merupakan keyakinan atau emosi yang dianggap sebagai bagian dari diri seseorang, yang memberikan nuansa tertentu pada cara seseorang berpikir dan berperilaku. Definisi nilai merupakan keyakinan atau identitas yang general, Penjelasannya dalam bentuk rumus, aturan, atau ketentuan pelaksanaannya disebut norma. Norma ialah cara untuk menjelaskan Nilai berdasarkan karakteristik dan aturan yang ada. Nilai yang bisa diterima secara umum. Linda dan Ricard Eyre berpendapat bahwa ini dapat memberikan efek baik

pada tingkah laku, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Sri Lestari dalam bukunya tentang Psikologi Keluarga menjelaskan bahwa nilai (*values*) menurut Berns adalah kualitas atau keyakinan yang diinginkan atau dianggap penting. Selain itu, Sri Lestari juga menyatakan pandangan Oyserman bahwa nilai bisa dimengerti dalam tingkat individu dan kelompok. Dalam tingkatan personal, nilai adalah pandangan sosial atau keyakinan moral yang diambil dan dipakai orang sebagai dasar akhir untuk tindakan mereka. Nilai digunakan untuk menyesuaikan diri terhadap dorongan yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok di mana individu berada. Maka nilai-nilai sangat penting dalam kehidupan sosial. Dalam kelompok, nilai adalah aturan atau norma budaya yang dipatuhi oleh semua anggota kelompok, atau sebagai pemikiran bersama kelompok (*the group's social mind*).

Dalam kamus Bahasa Indonesia, nilai merujuk pada karakteristik atau aspek-aspek yang memiliki arti penting atau bermanfaat bagi manusia. Drs. KH. Muslim Nurdin dan Kawan-Kawan berpendapat nilai sebagai keyakinan atau emosi yang dianggap sebagai suatu jati diri yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak yang tertentu. Nilai merupakan kepercayaan atau emosi yang dianggap sebagai bagian dari diri seseorang, yang memberikan nuansa khusus pada cara berpikir, merasakan, berinteraksi, dan bertindak seseorang.

Secara umum, Nilai merupakan konsep yang tidak nyata dan sempurna. Konsep ini berhubungan dengan kepercayaan terhadap hal-hal yang dipandang penting, dan memengaruhi cara berpikir, merasa, dan bertindak seseorang. Dalam memahami suatu nilai, penting untuk mengenali perilaku, sikap, pola pikir, dan tindakan individu atau kelompok agar dapat menafsirkan kenyataan. Nilai merupakan sifat yang melekat pada sistem kepercayaan yang terkait dengan subjek dan memiliki makna. Jelas bahwa nilai adalah aturan yang diakui benar oleh masyarakat karena bersifat manusiawi, yang kemudian menjadi perasaan umum, identitas umum, dan menjadi norma yang tercermin dalam perilaku manusia.

Islam dijelaskan dalam Kamus Ilmiah Populer sebagai agama yang damai, tentram, dan dibawa oleh nabi Muhammad SAW melalui Al Qur'an. Penting bagi seorang mukmin yang ingin mempraktikkan ajaran Islam secara menyeluruh untuk memahami luasnya materi ajaran Islam. Selain itu, Pemahaman mengenai pentingnya nilai-nilai dan elemen yang ada dalam ajaran Islam juga harus dipahami. Pengajaran Islam di kalangan umat adalah cara Islam untuk menjaga dan meneruskan nilai-nilai Islam kepada generasi selanjutnya. Seorang penganut Islam seharusnya memiliki prinsip-prinsip yang berlandaskan kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Allah SWT merupakan sumber utama yang wajib diikuti.

Penanaman nilai-nilai Islam adalah ide yang mencakup pedoman-pedoman yang sejalan dengan pengajaran agama Islam. Apabila di sekolah guru berusaha menanamkan nilai-nilai keislaman pada siswa. Maka dasar nilai-nilai Keislaman didasarkan pada ajaran-ajaran dalam Islam yang terdapat di al-Quran. Muhammad Azmi menyatakan bahwa dasar itu kemudian dijelaskan oleh para ulama melalui *ijtihad* yang mencakup *qiyas* dan *ijma'* yang diakui. Mohammad Daud Ali mengatakan bahwa Al-Quran adalah sumber agama Islam yang sangat penting. Al-Quran tidak hanya berperan dalam perkembangan ilmu keislaman, tetapi juga sebagai kerangka untuk semua kegiatan.

Seperti yang dikatakan oleh Allah SWT. dalam *QS. Al Maidah: 48* adalah:

“Dan Kami telah menurunkan Kitab (al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu<sup>43</sup>, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah Menghendaki, niscaya kamu dijadikan- Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak Menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan”

Selain itu, seperti yang dikemukakan oleh Zuhairini, Al-Quran juga berfungsi secara praktis dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Maka prinsip-prinsip pengajaran akan berguna bagi manusia dimana ia berada. Dalam buku yang sama juga disebutkan bahwa Al-Quran mengandung berbagai pengajaran mengenai dasar-dasar pendidikan. Sumber kedua dari agama serta ajaran Islam adalah Hadits, yang berperan sebagai penjelas utama dan pelengkap untuk Al-Quran.

### **2.2.2 Nilai-Nilai Islam Dalam Politik**

Al-Mawardi, seorang ulama terkenal, merupakan salah satu tokoh individu yang sangat berpengaruh dalam merancang ide pemerintahan dalam Islam. Karya besar *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* telah menjadi panduan utama bagi para pemimpin dan pemikir Islam selama bertahun-tahun. Dalam buku ini, Al-Mawardi menjelaskan aturan lengkap tentang pemerintahan negara Islam, termasuk syarat-syarat menjadi pemimpin dan cara pemerintahan dilaksanakan. Salah satu prinsip penting dalam pemikiran politik Al-Mawardi adalah keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan menjadi dasar utama bagi pemerintahan yang sah. Keadilan harus dijalankan di semua bagian kehidupan negara, termasuk di antara pemimpin dan rakyat serta antarwarga negara. Al-Mawardi menyebutkan bahwa seorang pemimpin yang bagus adalah yang mengikuti peraturan Allah dan selalu berusaha untuk menjamin keadilan di masyarakat. Dia juga menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berdasarkan syariah Islam. Menurutnya, seorang pemimpin harus paham betul tentang hukum Islam dan bisa mengaplikasikannya dalam pemerintahan. Pemimpin perlu memiliki perilaku yang baik dan bisa menjadi contoh bagi rakyatnya.

Al-Mawardi menyatakan bahwa kepemimpinan tanpa dasar syariah Islam tidak valid dan tidak akan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Al-Mawardi membicarakan peran rakyat dalam pemerintahan dalam bukunya *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Dia sadar bahwa rakyat punya hak untuk memilih pemimpin dan mengawasi kinerja pemimpin. Masyarakat juga punya hak untuk mengungkapkan pendapat dan harapannya kepada pemimpin. Namun, Al-Mawardi menegaskan bahwa hak-hak warga harus sesuai dengan aturan

syariah Islam. Al-Mawardi menyoroti betapa krusialnya diskusi dalam membuat keputusan. Para pemimpin perlu melibatkan para ahli agama, tokoh masyarakat, dan rakyat dalam pengambilan keputusan yang penting. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghindari terjadinya perpecahan.

Imam Al-Ghazali, seorang ulama ternama pada abad ke-11, terkenal karena dapat menggabungkan ilmu fikih, filsafat, dan tasawuf. Karya besar yang bernama *Ihya Ulum al-Din* atau Kebangkitan Ilmu-ilmu Agama sangat penting bagi umat Islam untuk memahami berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Dalam buku *Ihya Ulum al-Din*, Al-Ghazali memberikan perhatian khusus pada etika kepemimpinan. Dia menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan agama yang sekaligus akhlak yang baik. Menurut Al-Ghazali, seorang pemimpin ideal adalah yang taat pada perintah Allah, adil, jujur, amanah, dan bisa menjadi teladan bagi rakyatnya. Al-Ghazali menyatakan bahwa seorang pemimpin perlu menyeimbangkan antara kehidupan di dunia dan kehidupan setelah mati. Dia tidak hanya ingin memperbaiki bangunan dan ekonomi, tetapi juga peduli dengan kebutuhan rohani masyarakatnya. Pemimpin yang baik adalah yang bisa membuat masyarakat sejahtera di dunia dan akhirat. Al-Ghazali menganggap politik sebagai salah satu bentuk ibadah. Setiap tindakan seorang pemimpin, baik dalam membuat kebijakan maupun menjalankan pemerintahan, harus didasari oleh niat yang tulus untuk mencari ridha Allah. Oleh karena itu, politik bukan hanya tentang persaingan kekuasaan saja, melainkan juga sebagai cara untuk mencapai kebaikan bagi manusia.

Adapun Nilai-Nilai Islam dalam konteks Berpolitik Menurut Luth, Thohir. dkk. 2020. Dalam *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam (Edisi Revisi)*. Sebagai Berikut:

- 1) Musyawarah

Musyawarah dalam Islam adalah sebuah cara untuk membuat pilihan bersama melalui pembicaraan, debat, dan bertukar ide. Prinsip ini sangat

ditekankan dalam ajaran Islam sebagai cara yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah dan mencapai kesepakatan bersama. Konteks musyawarah dalam Islam sangat luas, mulai dari urusan pribadi hingga negara. Dalam Al-Quran, konsep musyawarah disebutkan dalam beberapa ayat, seperti dalam surah *asy-Syura* ayat (38) yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Musyawarah tidak hanya sekadar berdiskusi, tetapi juga melibatkan pertimbangan yang matang, saling menghargai pendapat, dan mencari solusi terbaik yang membawa maslahat bagi semua pihak. Prinsip ini juga di termaktub dalam Al-Qur'an Surat *Al-Imran* (3):159, yang berbunyi:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakal lah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”

Dalam konteks negara, musyawarah menjadi dasar dalam pembentukan pemerintahan dan pembuatan kebijakan. Pemimpin yang efektif adalah mereka yang selalu berdiskusi dengan masyarakatnya. Begitupun kehidupan sehari-hari, musyawarah diterapkan dalam keluarga, masyarakat, dan organisasi. Tujuan utama dari musyawarah adalah mencapai kesepakatan yang adil dan bijaksana, serta memperkuat persatuan dan kesatuan.

## 2) Keadilan

Keadilan dalam politik Islam merupakan fondasi utama yang menopang seluruh sistem pemerintahan. Keadilan bukan hanya sekadar konsep abstrak, tetapi merupakan nilai yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan dan tindakan politik. Dalam Islam, keadilan diartikan sebagai pemberian hak kepada setiap individu sesuai dengan porsi dan kedudukannya, tanpa adanya diskriminasi. Keadilan juga berarti

menerapkan hukum dengan adil dan tanpa memihak, serta memberikan perlindungan kepada yang lemah dan menindas yang kuat.

Konteks keadilan dalam politik Islam meliputi banyak hal dan mencakup berbagai sisi kehidupan negara. Salah satu aspek penting adalah keadilan sosial. Keadilan sosial mengacu pada pembentukan situasi yang memungkinkan setiap orang untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ajaran Islam, negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Selain itu, negara juga harus menjamin adanya pembagian kekayaan yang adil, agar tidak terjadi kesenjangan yang signifikan antara orang-orang yang kaya dan yang miskin.

Aspek lain dari keadilan dalam politik Islam adalah keadilan hukum. Dalam Islam, hukum harus ditegakkan secara tegas dan konsisten. Setiap individu, tanpa kecuali, harus tunduk pada hukum. Keadilan di bidang hukum juga berarti memberikan peluang yang setara untuk semua individu agar dapat memperoleh keadilan di depan hukum. Di samping itu, proses pengadilan harus berlangsung dengan terbuka dan jelas, sehingga masyarakat dapat memantau bagaimana hukum dilaksanakan. Begitupun termaktub pada Al-Quran Surah *Al-Nahl* (16):90, yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”.

Secara singkat, prinsip keadilan dalam politik Islam adalah nilai yang sangat krusial dan harus diimplementasikan dalam semua bidang kehidupan negara. Keadilan dalam sosial dan hukum adalah dua bagian yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Dengan menegakkan keadilan, diharapkan bisa terbentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur.

### 3) Kebebasan

Kebebasan dalam politik Islam bukanlah kebebasan absolut tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab dan terarah pada kebaikan bersama. Kebebasan ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan hak serta tanggung jawab setiap orang dalam komunitas. Dalam konteks politik Islam, kebebasan bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan makmur, di mana setiap orang bisa terlibat secara aktif dalam politik tanpa merugikan kepentingan bersama.

Konteks kebebasan dalam politik Islam sangat erat kaitannya dengan konsep masalah (kemaslahatan). Setiap tindakan politik harus diukur berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat adalah beberapa contoh kebebasan dalam politik Islam. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dengan bijak dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, Kebebasan untuk berbicara tidak seharusnya digunakan untuk menyebarkan kebencian, berita bohong, atau pengajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagaimana Allah Berfirman dalam, Surah *Taha* (20):123, yang berbunyi:

“Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.”

Lebih lanjut, kebebasan dalam politik Islam juga menekankan pentingnya musyawarah dan demokrasi. Setiap keputusan politik yang penting harus diambil melalui musyawarah dan mufakat. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki penghargaan yang tinggi terhadap pandangan dan harapan semua anggota masyarakat. Namun, demokrasi dalam Islam berbeda dengan demokrasi liberal yang cenderung mengutamakan kepentingan individu di atas kepentingan bersama.

Demokrasi dalam Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang luhur.

#### 4) Kesetaraan

Kesetaraan dalam politik Islam adalah dasar penting yang menyatakan bahwa setiap manusia diciptakan sama di depan Allah SWT. Ide ini berlandaskan pada pengajaran Islam yang menyatakan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan derajat di antara manusia berdasarkan ras, warna kulit, suku, atau status sosial. Prinsip kesetaraan ini jadi landasan untuk membangun masyarakat yang seimbang dan adil.

Konteks kesetaraan dalam politik Islam mencakup banyak hal dalam kehidupan bernegara. Dalam hal politik, prinsip kesetaraan mengindikasikan bahwa setiap orang yang menjadi warga negara memiliki hak dan kewajiban yang setara. Setiap individu dalam suatu negara berhak untuk terlibat dalam urusan pemerintahan, baik melalui cara langsung ataupun tidak. Selain itu, setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Prinsip Kesetaraan ini juga mengharuskan adanya perlakuan yang adil bagi semua lapisan masyarakat, termasuk yang minoritas.

Dalam praktik politik Islam, prinsip Kesetaraan seringkali diwujudkan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Dalam pengambilan keputusan, semua pendapat dan suara dari seluruh lapisan masyarakat harus didengar dan dipertimbangkan. Tujuan dari ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan semua pihak. Di samping itu, prinsip Keadilan juga terlihat dalam hukum Islam yang memastikan perlindungan untuk hak-hak individu dan kelompok. Sebagaimana Firman Allah Swt. Dalam Surah *Al-Hujurat* (49):13, yang berbunyi:

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

Singkatnya, Kesetaraan dalam politik Islam merupakan nilai fundamental yang harus dijunjung tinggi. Prinsip ini menjadi landasan bagi terbentuknya komunitas yang adil, demokratis, dan makmur. Dengan menegakkan prinsip persamaan, diharapkan dapat tercipta kehidupan yang harmonis dan saling menghormati antar sesama manusia.

#### 5) Anti Politik Uang

Anti politik uang adalah sikap penolakan terhadap segala bentuk praktik pemberian atau penerimaan uang atau materi lainnya dengan tujuan memengaruhi pilihan politik seseorang. Dalam konteks pemilu, politik uang seringkali dilakukan dengan cara pemberian uang, sembako, atau hal lain yang diberikan kepada yang memiliki suara dalam hal ini masyarakat yang harapannya mereka akan memilih calon tertentu. Islam melarang politik uang karena karena jelas itu adalah perbuatan yang dilarang dan tercela. Praktik ini termasuk dalam kategori *risywah* atau suap, yang dimana ini jelas tentu dilarang dalam Al-Qur'an maupun hadis. Politik uang tidak sejalan dengan prinsip Amanah, Keadilan dan kejujuran yang sangat ditekankan dalam Islam. Selain itu, politik uang juga merusak tatanan demokrasi karena mengorbankan integritas pemilu dan menghambat terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an Surah *Al-Baqarah* (2):188, yang Berbunyi:

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Dalam upaya terwujudnya pemerintahan bersih, adil, mamur maka konteks politik uang tentu menjadi hal yang sangat ditekankan dalam islam. Politik uang dapat merusak tatanan sosial dan ekonomi karena menciptakan ketidakadilan dan kesenjangan sosial. Selain itu, politik uang juga dapat menghambat pembangunan negara karena anggaran negara yang diperuntukan untuk membangun bangsa ini malah digunakan oleh segelintir orang kepentingan politik kelompoknya atau bahan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan untuk menghindari segala bentuk politik uang dan membangun sistem politik yang bersih dan transparan.

- 6) Prinsip Boleh meminta Pertanggungjawaban pemimpin atas kinerjanya dalam ruanglingkup Pemerintahan.

Prinsip meminta pertanggungjawaban pemimpin atas kinerja mereka merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam. pemimpin ialah hamba Allah yang bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya. Dalam Al-Qur'an dan hadis, terdapat banyak ayat yang menegaskan betapa pentingnya memiliki pemimpin yang adil dan bertanggung jawab. Pemimpin wajib menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan siap dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Dalam Islam, rakyat memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan musyawarah. rakyat berhak mengetahui bagaimana pemimpin menjalankan tugasnya, Dalam melaksanakan tugasnya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau belum. Jika pemimpin melakukan kesalahan atau penyelewengan, maka rakyat berhak untuk menuntut pertanggungjawabannya. Dalam beberapa kasus, rakyat bahkan berhak untuk memberhentikan pemimpin yang tidak menjalankan tugasnya yang seharusnya. Seperti Firman Allah di Surah *Al-Anfal* (8):27, yang berbunyi:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Mekanismenya, di Islam, terdapat beberapa cara untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin. Salah satunya adalah melalui musyawarah. Rakyat dapat menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka kepada pemimpin melalui forum-forum musyawarah. Selain itu, dalam Islam juga dikenal konsep khilafah, yaitu kepemimpinan yang bersifat amanah. Khalifah atau pemimpin harus selalu siap untuk dimintai pertanggungjawaban oleh rakyatnya. Jika khalifah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, maka rakyat berhak untuk memilih khalifah yang baru.

Kesimpulannya, prinsip meminta pertanggungjawaban pemimpin merupakan bagian integral dari sistem politik Islam. Prinsip ini krusial untuk memastikan bahwa pemimpin senantiasa melaksanakan perannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Pun demikian, dapat tercipta pemerintahan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Dalam ajaran Islam, pengertian politik sangat luas. Ini bukan hanya tentang penguasaan dan jabatan dalam lembaga pemerintah, tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat dalam kehidupan mereka serta interaksi sosial secara keseluruhan. Harapannya, para pemimpin kita selalu menghargai prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an demi kesejahteraan rakyat.

Sopi Ema dan Kawan-Kawan (2024) dalam Jurnalnya berpendapat Nilai-Nilai islam dalam politik itu didasari pada etika Politik. Martabat suatu negara sangat dipengaruhi oleh etika politik yang diperlihatkan oleh para elit pemerintahannya. Etika memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan individu untuk berpikir kritis dan rasional, karena membantu mereka mengembangkan pemikiran mandiri dan bertindak secara bertanggung jawab. Studi etika politik cenderung lebih dalam, abstrak, dan filosofis. Ini melibatkan seni kepemimpinan dan

kekuasaan yang mengikuti hukum, peraturan, serta nilai-nilai sosial, tradisi, dan agama. Hal ini dianggap sebagai sumber nilai yang dapat meningkatkan martabat dan keberadaban suatu bangsa, Ritaudin, 2014 (dalam Sopi Ema dan Kawan-Kawan, 2024, hlm. 215).

Etika Politik dalam Islam terdapat ciri-ciri berbeda daripada etika politik umum karena Etika Politik di Islam berdasarkan pada ajaran rosul juga perintah Tuhan yang bersumber dari Al'Quran juga Hadist. Pentingnya pemahaman deduktif dari ajaran yang terdapat di Al-Qur'an juga hadist Rasul. Saat menghadapi realitas sosial, penting untuk melegitimasi realitas tersebut dengan mempertimbangkan Etika Politik Islam. Hasil yang bertentangan dengan nilai-nilai indoktrinasi dapat dijustifikasi jika sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam teks-teks tersebut. Oleh karena itu, epistemologi akhlak dalam Etika Politik Islam tidak bisa dipisahkan dari cara-cara pemahaman dan analisis, terutama dalam hubungannya dengan pelaksanaan etika politik, di mana hampir semua pilihan dalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Dahlan, 2021). Walaupun Al-Quran tidak secara langsung membahas evolusi sistem politik, dalam buku itu ditekankan bahwa pentingnya memberikan kekuasaan politik kepada individu yang beriman dan berakhlak baik. Ini menunjukkan keterkaitan antara kekuasaan politik dengan ciri-ciri tersebut. Selain itu, politik juga terkait dengan konteks geografis dan historis, menunjukkan bahwa hubungan politik merupakan bagian penting dari warisan budaya manusia dan terkait erat dengan sejarahnya.

Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pemerintahan, di mana diperlukan sosok pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat dan bertugas untuk kepentingan mereka. Politik melibatkan sistem dengan komponen yang terkait dan mendukung satu sama lain. Selain itu, Politik mencakup berbagai kegiatan di suatu negara yang berkaitan dengan tujuan dan strategi untuk mencapainya (Askana Fikriana & Kahfi Rezki, 2023). Secara keseluruhan, nilai-nilai etika politik yang terdapat dalam karya-karya

sejumlah pemikir Muslim tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dalam kehidupan berpolitik. Namun, ada beberapa konsep yang jika diterapkan di negara demokrasi seperti Indonesia, bukan negara yang berbasis Islam, akan memerlukan penafsiran ulang agar dapat dilaksanakan. Namun, sifat-sifat yang diminta dari seorang pemimpin, sangat sulit untuk dimiliki seluruhnya oleh satu orang. Karenanya, penulis setuju dengan gagasan al-Farabi untuk menjadikan kepemimpinan sebagai tanggung jawab kolektif yang memperhitungkan kemampuan individu, In'amuzzahidin, 2016 (dalam Sopi Ema dan Kawan-Kawan, 2024, hlm. 216).

Para pemimpin politik Islam sudah menjadi contoh pertama dalam menerapkan prinsip-prinsip moral etika di negaranya. Mereka merupakan contoh bagus untuk masyarakat di segala aspek, dari ide hingga perilaku. Ini adalah fokus utama yang ditekankan oleh ulama Islam mengenai kepemimpinan dalam agama Islam. Hal tersebut dijelaskan oleh al-Mawardi, Ibn Jamaalih, Ibn Albi al-Rabi', Ibn Taimiyah, dan ulama lainnya. Dari mendorong penerapan program moral dan etika dalam segala aspek kehidupan. Dengan sistem politik Islam, mereka telah ikut memperbaiki perilaku buruk pemimpin seperti korupsi, politik uang, skandal seks, penyalahgunaan kepercayaan, penipuan, dan penyelewengan dalam pemerintahan publik. Hal ini memberikan manfaat besar bagi kegiatan mereka dan bisa membantu membangun hubungan yang baik tanpa adanya penyalahgunaan. Karena itu, penting bagi warga untuk bersikap bersih dan etis saat memiliki pemimpin yang juga bersikap bersih dan etis. Seorang pemimpin yang tidak etis akan mengalami kesulitan dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan rakyat yang berpikir dengan benar dalam perilakunya. Menyimpang dari janji kampanye akan menimbulkan masalah dari segi filosofis, hukum, dan sosial Menurut Sholeh (2021), pemerintah perlu menambahkan pendidikan politik pada pelatihan calon pemimpin untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem politik, demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan politik. Menurut Rahmayanti dan rekan (2024), seorang pemimpin politik yang memegang kekuasaan di

negara tersebut harus mengikuti lima prinsip etika politik Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:

#### 1) Landasan Etika Kepemimpinan dalam Agama

Agama dapat melindungi manusia dari perilaku atau niat yang salah. Selain itu, menjaga agama (*hifzu al-dîn*) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus menaati perintah, prinsip, dan hukum Ilahi saat memimpin. Kebijakan politik yang diambil oleh pemimpin negara harus selalu mempertimbangkan ajakan dari Allah SWT. Dengan adanya kode etik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin atau pejabat publik harus berasal dari ajaran agama. Dalam keyakinan ini, Seringkali tanggung jawab tersebut bertabrakan satu sama lain, yang akhirnya menimbulkan ketakutan terhadap Tuhan, sehingga tindakan politik tidak selalu memberikan keuntungan yang sesuai untuk masyarakat luas.

Kebijakan politik pimpinan negara harus selalu sesuai dengan ajaran Allah SWT. Dengan kata lain, aturan yang ditetapkan oleh para pemimpin didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika. Dari keyakinan ini, semua tindakan berasal dari ketaatan dan ketulusan kepada Allah yang pada akhirnya mengarah pada pemeliharaan keadilan dan kebaikan umum. Agar kebijakan politik yang diterapkan tidak hanya untuk keuntungan individual, tetapi memberikan keuntungan yang adil untuk masyarakat luas.

#### 2) Mandat dalam Berkuasa

Ibnu Taimiyah juga menerapkan prinsip-prinsip amanah yang berlandaskan agama dalam karyanya yang terkenal, "*al-Siyasah al-Syar'iyah*". Dalam kajian tersebut, dia mempelajari pentingnya memenuhi amanah (*Al-Amana*) dengan ayat Quran Surah. Al-Nisa (4) ayat 58. Menurut Ibn Taimiyah, dalam menelaah masalah ekonomi, terdapat dua aspek krusial: pertama, yang berkaitan dengan hal-hal

dalam proses pemilikan (*al-walâyyât*), dan kedua, yang berhubungan dengan pembagian harta kekayaan (*al-almwâl*).

### 3) Adil dan Bijaksana dalam Menjalankan Hukum

Islam mengutamakan akhlak yang baik pada setiap orang. Akhlak yang baik diperlukan oleh seorang pemimpin atau pejabat politik, termasuk dalam kebijakan dan keadilan. Seorang pemimpin bisa meningkatkan kredibilitasnya, agar orang lain semakin menghormatinya. Lain juga, kepemimpinan yang diteladani oleh seorang pemimpin akan menciptakan keamanan dan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, Para pemimpin politik dan orang yang membuat keputusan yang memiliki etika politik yang baik dan bijaksana sangat diperlukan untuk membangun negara yang aman dan makmur sesuai dengan ajaran Islam.

### 4) Kapabel dalam Bidangnyanya

Ibnu Khaldun menyatakan empat prinsip bagi individu yang menduduki jabatan penting: kecerdasan, keadilan, kompetensi, serta kesehatan fisik dan mental. Kutipan ini menyatakan bahwa seseorang pemimpin diharuskan memiliki kecerdasan intelektual dan pengetahuan mendalam, serta keahlian dalam bidangnya. Para pemimpin maupun pejabat politik juga harus sehat secara fisik dan mental. Dengan demikian, mereka dapat bekerja secara optimal, sehingga dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta tanggung jawab mereka bisa membalik manfaat terhadap masyarakat luas.

### 5) Musyawarah

Dalam konteks politik Islam, musyawarah dianggap sebagai suatu kewajiban yang didasarkan pada perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk melaksanakan musyawarah, yang tentunya lebih ditekankan lagi oleh para pengikut Rasul. Kalau seorang pemimpin bersikap otoriter dan

feodal, maka pengikut atau rakyatnya mungkin akan merasa tertindas. Jelas bahwa konsep musyawarah dalam Islam bertujuan untuk meminimalisir perselisihan.

Penulis menyimpulkan bahwa Etika dan moral sangat penting dalam politik Islam. Mereka harus bertindak dengan jujur, benar, dan adil. Al-Quran menekankan bahwa politik harus dijalankan oleh individu yang beriman dan berperilaku baik. Ini menunjukkan hubungan erat antara politik dan konteks historis dalam budaya. Meskipun konsep etika politik dari beberapa pemikir Muslim sangat bagus, namun implementasinya di negara demokrasi seperti Indonesia bisa sulit dan perlu diinterpretasi ulang. Cara al-Farabi dalam mengenali kepemimpinan kolektif adalah dengan menilai kemampuan individu secara realistis. Pemimpin politik Islam yang etis menjadikan contoh bagi masyarakat dengan menghindari perilaku buruk dan korupsi, sehingga menciptakan tata kelola yang bersih dan beretika.

### **2.2.3 Konsepsi Politik dalam Islam**

Schmitter dan Blecher (2020) mengatakan bahwa Politik merupakan kegiatan paling dasar bagi manusia, yaitu “bidang ilmu yang paling penting” yang menjadi tempat bagi semua kegiatan manusia lainnya. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan pertikaian yang tidak dapat dihindari yang muncul saat kita tinggal bersama dalam suatu masyarakat di bawah keadaan kekurangan. Berdasarkan (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai merujuk pada sesuatu yang memiliki makna signifikan atau berguna bagi kehidupan manusia, elemen-elemen yang memperkaya dan menyesuaikan dengan hakikat sejati manusia. Frimayanti (2017), berpendapat nilai adalah sesuatu yang bersifat teoritis. Nilai tersebut melambangkan sifat-sifat yang terlihat dari tindakan seseorang yang berhubungan dengan kenyataan, kegiatan, norma, moral, dan kepercayaan. Islam dan politik berkaitan erat karena keduanya saling berhubungan satu sama lain. Ini bisa dilihat dari Islam sebagai ajaran, serta sebagai kenyataan dalam masyarakat. Begitupun ayat tentang berpolitik terdapat di *QS An-Nisa* ayat 58, dan ayat 135, *An-Nahl* ayat 90-91, *Ali-Imran* ayat 159, *Al-Hujurat* ayat 13, *Al-Maidah* ayat 8, *Al-Ahzab*

ayat 70, dan *Al-Ankabut* ayat 3. Dan Nilai-nilai Politik yang di ajaran di Islam antara lain ialah adil, Persamaan Hak dan Bermusyawarah

Dalam agama Islam, istilah untuk politik adalah siyasah. Kata siyasah berasal dari istilah sasa yang terdapat dalam kamus al-Munjid dan Lisan al-Arab. Siyasah berarti mengatur, memimpin, dan mengurus. Istilah Siyasah berasal dari Bahasa Arab yang berkaitan dengan kekuasaan dalam politik. Dalam karya sastra yang ada sebelum datangnya Islam, istilah siyasah menggambarkan cara suatu negara dikelola. Penggunaan tersebut menyebabkan artinya digunakan dalam Bahasa Arab modern. penggunaan ini menunjukkan pentingnya dalam bahasa Arab masa kini. Dalam kajian politik, seperti yang dijelaskan dalam al-Siyasah al-Madaniyyah oleh al-Farabi, siyasah merujuk pada bagian filsafat yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan politik. Dalam ajaran Islam Sunni, konsep pemerintahan yang mengikuti syariah dikenal sebagai siyasah syar'iyah. Istilah ini merujuk pada aspek aturan atau politik dari hukum Islam, yang telah ada sejak zaman Abad Pertengahan untuk mengaitkan hukum Islam dengan tuntutan politik, Wahyu AJ, 2018, hlm. 20 (dalam Oktaviani Lavan dan Kawan-Kawan, 2021, hlm. 57-58).

Dari penjelasan di atas, Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa siyasah memiliki banyak makna dalam bahasa, seperti mengorganisir, merawat, mengendalikan, memimpin, merumuskan kebijakan, berkuasa, dan terlibat dalam politik. Menurut terminologi yang termaktub di kitab Lisan al-Arab, siyasah merupakan upaya untuk mengelola atau memimpin dengan tujuan mendatangkan manfaat. Fiqh siyasah adalah ilmu yang membahas tentang urusan masyarakat dan negara, meliputi hukum, organisasi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa untuk kemaslahatan umat.

Ajaran Politik di Islam pasti berasal dari Al-Qur'an seperti halnya disiplin ilmu lain. Walaupun tidak terdapat ayat yang spesifik mengenai politik dan kekuasaan dalam Al Qur'an, prinsip-prinsip kehidupan dalam masyarakat dan interaksi sosial tetap dilihat sebagai bagian dari pengabdian. Bagian politik mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk ide tentang pemimpin, hukum

dan keadilan, serta isu-isu lain yang diatur dalam Al-Qur'an. Banyak ayat yang membahas secara tidak langsung mengenai konsep seperti Khilafah, Imamah, Wilayah, dan lainnya. Tujuan dari hal itu adalah untuk memastikan adanya keadilan dan penerapan hukum yang sesuai dengan kehendaknya Allah swt., M. Quraish Shihab, 2009, hlm. 22 (dalam Oktaviani Lavan dan Kawan-Kawan, 2021, hlm. 58).

Dalam Ajaran Islam, tidak terdapat perbedaan antara agama, pemerintahan, hukum, sistem demokrasi, dan politik. Muhammad Talha Alzahri melakukan studi dengan memanfaatkan teori lingkaran yang saling bersentuhan, elemen-elemen dasar, hukum, dan nilai-nilai yang terlibat. Hal ini membentuk lingkaran konsentris yang menciptakan kesatuan yang erat dan saling berhubungan. Keterkaitan antara agama Islam dan dunia politik sangat kuat, di mana dalam ajaran Islam, politik dianggap sebagai cara untuk menjaga dan melindungi umat. Dalam politik, jika seorang Muslim tidak mematuhi syariat, politik yang tidak sesuai dengan Islam akan mengarah pada kekalahan dunia. Maka, keberadaan prinsip-prinsip Islam dalam politik di Indonesia sangat penting sebagai pedoman dalam pergerakan politik. Dari konteks masalahnya, hubungan antara nilai-nilai politik dan evolusi hukum Islam tidak bisa dipisahkan. Hal ini karena hukum Islam berusaha untuk membentuk sistem kehidupan yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kehidupan masyarakat ini secara alami memerlukan regulasi yang sesuai dengan kondisi sosial yang dikenal sebagai politik. Islam memiliki panduan hidup yang penting bagi manusia (hukum halal-haram) yang mengandung nilai-nilai penting dalam kehidupan. Untuk memahami demokrasi, Zuharini, 2014, Lavan, 2021, Kurniati, 2013 (dalam Sopi Ema dan Kawan-Kawan, 2024, hlm. 21). terdapat beberapa nilai yang perlu ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi, seperti:

- 1) *Al-Musawah*, yaitu sebuah konsep kesetaraan di antara individu dalam hal martabat, derajat, dan posisi mereka. Dalam Islam, tidak ada perbedaan antara manusia dalam soal strata sosial, gender, atau ras, melainkan hubungan keunggulan seseorang diukur dari ketakwaan kepada Allah.

- 2) *Al-Hurriyah*, yaitu Kalimat itu menyatakan Bahwa kebebasan perlu disertai oleh tanggung jawab etis dalam hukum, baik di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya. Ide ini menekankan betapa pentingnya menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang mengakui bahwa setiap individu memiliki martabat yang diberikan oleh Tuhan dan kebebasan dalam memilih. Setiap orang berhak untuk menentukan pilihan mereka sendiri tanpa intervensi dari orang lain. Dalam Islam, prinsip ini sangat penting untuk mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa.
- 3) *Al-Ukhuwwah*, yaitu Membangun ide mengenai persahabatan di dunia musik menekankan kesamaan mereka sebagai ciptaan Tuhan yang setara.
- 4) *Al Adalah*, yaitu Ide tentang keadilan menyoroti pentingnya memenuhi kebutuhan manusia, tidak hanya sebagai orang perorangan tetapi juga sebagai bagian penting dari komunitas.
- 5) *Al Syura*, yaitu Musyawarah adalah salah satu aturan penting dalam kehidupan sosial, di mana masyarakat berhak untuk terlibat dalam hal-hal publik yang mempengaruhi kepentingan bersama.
- 6) *Al-Mas'Ulliah*, yaitu Setiap orang yang memegang kekuasaan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang prinsip tanggung jawab yang harus diemban. Kekuasaan perlu dijalankan dengan hati-hati karena merupakan tanggung jawab, bukan hanya untuk dinikmati. Mengenai pemimpin, amanah memiliki dua arti: sebagai anugerah dari Tuhan, sebagai tanggung jawab atas rakyat (Rohman, 2019).

#### **2.2.4 Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Politik di Indonesia**

Di Indonesia, prinsip-prinsip Islam mempunyai peranan krusial dalam membentuk tradisi politik, norma, keyakinan, pandangan, dan sikap yang berdampak pada tindakan orang perorangan serta kelompok dalam aktivitas politik dan struktur politik. Tanda yang paling utama adalah bahwa lima nilai Pancasila disetujui sebagai dasar pemikiran politik yang berlandaskan pada ajaran Islam. Cara nilai-nilai Islam diterapkan dalam budaya politik yang berlandaskan Pancasila sangat bergantung pada seberapa besar pengaruh nilai-nilai itu terhadap jalannya proses politik. Apabila nilai-nilai agama Islam mulai kehilangan pengaruh dalam dunia politik, maka hal itu dapat

dikatakan sebagai pengurangan keterkaitan agama dalam budaya politik. Banyak yang khawatir tentang dampak dari sekularisasi kultur politik, terutama jika Negara Sekular terbentuk. Figur-figur Islam pada waktu kemerdekaan berhasil mengintegrasikan nilai-nilai inti Islam ke dalam lima dasar Pancasila yang menjadi landasan ideologi negara Indonesia. Selanjutnya, para tokoh Islam meneruskan usaha pendahulu mereka dengan memasukkan hukum syariat Islam ke dalam sistem hukum Indonesia, yang masih banyak dipengaruhi oleh hukum Belanda. Pancasila sangat mendukung penyebaran nilai-nilai Islam di Indonesia melalui berbagai aspek kehidupan seperti budaya, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Semua harus bekerjasama, saling membantu antara seluruh kelompok masyarakat, termasuk ulama dan umat Islam di Indonesia (Oktaviani Lavan dan Kawan-Kawan, 2021, hlm. 60-61).

Politik Islam mengacu pada pertemuan antara Islam dengan pemerintahan dan negara, yang menghasilkan sikap serta tindakan politik dan budaya politik yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Sikap, tingkah laku, dan cara berpikir politik yang mengandung istilah Islam, berdasarkan Taufik Abdullah, berasal dari nilai-nilai moral dan ajaran yang berhubungan dengan kesatuan umat Islam (Syamsuddin D, 2001, hlm. 31). Seperti yang disampaikan oleh Ayyumardi (1996, hlm. 12), Saat ini, di seluruh dunia, politik yang berlandaskan Islam sedang berusaha untuk menguasai cara-cara memahami ajaran Islam serta organisasi-organisasi politik, baik yang resmi maupun yang tidak, yang mendukung pemahaman tersebut (dalam Oktaviani Lavan dan Kawan-Kawan, 2021, hlm. 61).

Pancasila sangat berusaha untuk mengakar-kan nilai-nilai Islam secara nyata di Indonesia, di berbagai aspek seperti budaya, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan penerapan ajaran Islam di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peraturan yang muncul dari dunia politik. Pada masa Orde Baru, terdapat kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan Pancasila serta UUD 1945 dengan penuh keikhlasan dan konsistensi. Keberhasilan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam di dalam sistem konstitusi Indonesia. Pasal 34 dan Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa

"Negara berdiri di atas Ketuhanan Yang Maha Esa," dan semua warga negara dijamin haknya untuk menjalani agama yang mereka pilih. Pasal 34 menekankan keterlibatan negara dalam urusan agama.

Pada masa Orde Lama, dibentuk Undang-Undang No.14 Tahun 1970 yang menjelaskan posisi Pengadilan Agama sebagai bagian dari sistem peradilan yang berhubungan dengan Mahkamah Agung. Penerapan hukum Islam menjadi lebih nyata dengan adanya undang-undang yang lain. Dan di tekankan dalam Undang-undang No. 14 tahun 1989 tentang peradilan agama untuk mengokohkan posisi dan tujuan peradilan agama. Dimasa Reformasi, diikuti oleh Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 mengenai Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, memungkinkan adanya pembuatan peraturan undang-undang yang bersumber dari hukum Islam. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Nomor 11 Tahun 2002.

Penerapan politik Islam di Indonesia melibatkan hukum sebagai pedoman dalam pembuatan kebijakan oleh lembaga-lembaga negara. Peraturan juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai apakah kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan negara dalam konteks pemikiran kebijakan hukum. Politik hukum adalah usaha untuk membuat hukum menjadi proses pencapaian tujuan dan cita-cita. Dengan makna ini, politik hukum nasional harus didasarkan pada beberapa kerangka dasar. Kebijakan hokum dan politik hukum di tingkat nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Kebijakan dan hukum di negara ini harus ditujukan untuk meraih tujuan dari negara. (Mahfud MD, 2010, 30). Agar bisa mencapai tujuan dan cita-cita, kita perlu membangun sebuah sistem hukum nasional yang didasarkan pada prinsip prinsip dasar dari nilai Pancasila. Sistem hukum ini menyatukan beragam kepentingan, nilai-nilai sosial, dan ide-ide hukum menjadi satu keseluruhan yang lengkap dengan memanfaatkan yang terbaik dari masing-masing unsur. Dalam kemajuan hukum di Indonesia, terutama terkait penerapan hukum Islam, hukum tersebut telah berubah sesuai dengan situasi

politik yang berlangsung. Apa yang diinginkan serta diperjuangkan oleh pihak yang berkuasa, baik yang berada di lembaga pemerintahan maupun yang memiliki posisi politik, adalah agar hukum Islam ditegakkan sejalan dengan kebijakan yang berlaku (dalam Oktaviani Lavan dan Kawan-Kawan, 2021, hlm. 62)

Penerapan politik agama Islam melalui Gerakan Islam Kultural berusaha untuk mewujudkan hukum Islam secara resmi di Indonesia di setiap fase sejarah, walaupun hal ini bisa menimbulkan perdebatan. Perdebatan ini muncul karena berbeda pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Akibatnya, terdapat variasi dalam pendekatan dan pengertian tentang hukum Islam dalam kehidupan sosial. Gerakan Islam yang berbasis budaya tidak membutuhkan pembentukan negara Islam atau penerapan hukum Islam dengan menggunakan kekuatan pemerintah. Bagi sebagian orang, hal yang krusial adalah menanam dan menyebarkan prinsip-prinsip Islam tanpa perlu menyebutkannya secara resmi atau mengemasnya dalam bentuk yang formal sebagai ajaran Islam. Nilai-nilai yang krusial mencakup keadilan, keterusterangan, tanggung jawab, kekuasaan hukum, kesetaraan yang tidak membedakan gender, penghormatan terhadap keyakinan dan agama orang lain, serta banyak hal lainnya (Mahmudah S, 2012, hlm. 409). Pendekatan berbasis budaya dianggap lebih efisien dan dapat diterima oleh semua kalangan. Dengan mendukung prinsip-prinsip penting dari ajaran Islam, anjuran untuk melakukan kebaikan dan menghindari kejahatan sejatinya dapat dilaksanakan tanpa merugikan individu yang bukan Muslim karena sifatnya yang bersifat umum. Langkah yang diambil dalam gerakan budaya ini adalah menciptakan komunitas Islami, bukan suatu negara Islam, Arifin S, 2013, hlm. 21 (dalam Oktaviani Lavan dan Kawan-Kawan, 2021, hlm. 62)

Alasan mengapa politik Islam diterapkan di Indonesia adalah melalui kegiatan budaya. Islam menghormati keberagaman di antara orang-orang, termasuk dalam hal agama. Bukti yang biasa dipakai untuk ini adalah pasal dari Alquran, contohnya yang ada dalam surah al-Kâfirûn “*lakum dînukum wa liya dîn,*” (agamamu untukmu, agamaku untukku), “*lâ ikrâha fî al-dîn*” (tidak ada paksaan dalam beragama). Dua prinsip utama dalam usaha Islam

adalah berjuang untuk nilai-nilai yang nyata dan bukan hanya menjunjung simbol-simbol resmi lembaga. Bukti yang dipakai adalah bahwa dalam Islam, yang utama adalah isi, bukan tanda-tanda yang resmi. Selain itu, Tidak ada ketentuan dalam Islam yang mewajibkan pembentukan negara Islam. Dengan demikian, gagasan tentang masyarakat madani muncul dari tradisi Islam, yang menggambarkan sebuah komunitas yang mengakomodasi berbagai agama dan kelompok etnis yang hidup saling menghormati dan memiliki kesetaraan, serta peradaban dan sistem yang bersifat demokratis. Keempat, sebuah aturan dalam fikih mengatakan "jika upaya tidak berhasil sepenuhnya, jangan tinggalkan semuanya." Dalam memahami Islam serta urusan negara atau politik, bisa dijelaskan bahwa jika orang-orang Muslim tidak bisa membangun negara mereka sendiri karena tinggal di tempat dengan berbagai budaya, mereka harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk terus berjuang menggunakan cara yang mereka miliki (Syamsul Arifin, 2013, hlm. 22).

Peluang yang tersisa dan yang lebih signifikan untuk memperjuangkan Islam adalah dengan menerapkan "ibrah" (pedoman dasar) untuk menyebarkan nilai-nilai pokok dari ajaran Islam, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, toleransi di dalam kehidupan beragama, menegakkan keadilan, menghargai kesetaraan antar sesama, penegakan hukum, menciptakan kedamaian dan kemajuan bersama, bisa dipercayai, serta ketulusan. Ini adalah semua pelajaran yang harus diterapkan oleh Islam di masyarakat tanpa perlu menggunakan tanda-tanda resmi dari Islam.

Tanda-tanda resmi tidak perlu ditekankan dalam praktik keagamaan yang sesungguhnya, karena praktik tersebut bisa dilakukan di mana saja tanpa harus berada di tempat resmi tertentu. Mengapa ada orang yang menyebut dirinya Muslim di depan orang lain, tetapi tidak bertindak sesuai dengan ajaran Islam yang seharusnya dan sebenarnya. Oleh karena itu, Nilai-nilai Islam yang jelas, bukan hanya sebagai simbol, dapat digunakan sebagai dasar hukum nyata untuk diterapkan sebagai hukum yang berlaku, karena Indonesia mengikuti paham realisme hukum. Sebagai kesimpulan, untuk melaksanakan hukum Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam, umat Islam harus

berpartisipasi dalam urusan politik di berbagai lembaga seperti badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Umat Muslim perlu memiliki pengaruh di berbagai sektor kekuasaan untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam proses pembentukan undang-undang (Ahmad Sugiri, 1996, hlm. 43). Usaha yang paling mungkin dan paling penting adalah untuk mendukung komunitas Muslim, yaitu komunitas yang berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip dan arahan Islam tanpa perlu secara resmi atau teridentifikasi sebagai Muslim. Menjaga prinsip-prinsip utama dalam Islam seperti fairness, sincerity, trustworthiness, menghargai hak asasi manusia, dan mengapresiasi keyakinan orang lain tidak dapat ditentang oleh pihak lain.

## **2.3 Konsep Pendidikan Politik**

### **2.3.1 Pengertian Politik**

Asal usul kata politik datang dari kata dalam bahasa Yunani "polis," yang merujuk pada kota atau negara kota. Seiring waktu, istilah 'polies' berkembang menjadi 'polities,' yang berarti penduduk negara. Politea mencakup segala aspek yang berkaitan dengan negara, politika berhubungan dengan pengelolaan negara, dan politikus mengacu pada status kewarganegaraan. Politik adalah kegiatan yang terjadi di negara untuk mencapai tujuan bersama melalui sistem politik. Dalam usaha mencapai sasaran itu, pemerintah merancang aturan dan menetapkan hal-hal yang harus diberikan perhatian utama saat melaksanakannya (Sumanto dan Haryanti, 2021, hlm. 1). Secara keseluruhan, partai politik bisa didefinisikan sebagai "sekelompok individu yang terorganisir yang memiliki pemikiran, prinsip, dan cita-cita yang serupa". Misi dari kelompok ini adalah untuk meraih pengaruh dalam dunia politik dan menempati jabatan politik, biasanya melalui cara yang legal untuk menjalankan kebijakan yang mereka inginkan.

Menurut Aristoteles Politik ialah "Upaya untuk mengoptimalkan potensi setiap individu dan meningkatkan kualitas hidup terjadi melalui hubungan politik dengan orang lain. Hubungan ini berlangsung dalam institusi yang dibentuk untuk memecahkan masalah sosial dan menetapkan tujuan negara. Kata politik merujuk pada satu sisi kehidupan, yaitu kehidupan politik, yang

biasanya dipahami sebagai kehidupan yang berhubungan dengan berbagai unsur kekuasaan, mencakup: Negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, politik, dan distribusi atau alokasi”. Politik dapat dipahami sebagai kegiatan yang terjadi di sebuah negara untuk mengimplementasikan sistem pemerintahan yang ada demi mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan itu, sebuah negara perlu merancang kebijakan dan menentukan prioritas yang harus ditekankan saat melaksanakannya. Agar kebijakan tersebut dapat berjalan, dibutuhkan kekuasaan dan wewenang yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mampu menerapkan kebijakan itu (dalam Sumanto dan Haryanti, 2021, hlm. 1).

Pendapat Johan Kaspar Blunschli dalam bukunya *“The Teory of the State”* menyatakan bahwa Ilmu Politik adalah ilmu yang mempelajari negara, mencoba untuk memahami negara dalam kondisi, sifat-sifat dasar, berbagai bentuk atau perkembangannya. Ilmu ini berfokus pada masalah kenegaraan dan upaya untuk memahami serta menggali pengetahuan tentang negara serta keadaannya. Dalam buku "Pengantar ke Pemikiran Politik", Deliar Noer mengatakan bahwa Ilmu Politik berkaitan dengan isu-isu kekuasaan dalam masyarakat. Kehidupan tidak hanya berhubungan dengan aturan dan pemerintahan. Negara adalah sesuatu yang muncul dalam sejarah umat manusia dan masih terbilang baru. Sebelum negara ada dan di luar hukum, persoalan tentang kekuasaan sudah ada sejak lama. Namun, hanya di zaman sekarang ini, kekuasaan sangat berhubungan dengan adanya negara (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 3-4).

Carl J. Friedrich menggambarkan partai politik sebagai “sekelompok individu yang terorganisir dengan baik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan atau menjaga kekuasaan dalam pemerintahan demi keuntungan para pemimpin partai dan untuk meraih keuntungan ideologis serta material dari kekuasaan ini bagi para anggotanya.” Di sisi lain, R.H. Soltau mengungkapkan bahwa “Partai politik merupakan kumpulan individu yang bekerja sama sampai pada level tertentu yang berfungsi sebagai kelompok politik dan memanfaatkan kekuasaannya dalam pemilihan umum dengan

tujuan untuk menguasai pemerintahan dan menerapkan kebijakan publik,” (dalam Fathurahman, 2021, hlm. 8).

Menurut Noer (1997), Politik mencakup semua kegiatan atau tindakan yang terkait dengan kekuasaan dan bertujuan untuk memengaruhi, entah melalui perubahan maupun pemeliharaan, struktur dari suatu komunitas tertentu. Dengan kata lain, menurut Noer, politik berkaitan dengan kebijakan sistemik yang ditetapkan untuk diikuti dan dihormati oleh setiap individu yang tinggal di masyarakat tersebut, Karena itu, pemerintah bisa memakai cara yang disebut dengan kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan ini bisa menjadi penghalang bagi rakyat atau membuat rakyat melawan penguasa. Tidak seperti pendapat Noer, Budiardjo (2008) berargumen bahwa aktivitas politik secara umum mencakup banyak kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang berhubungan dengan proses penentuan tujuan sistem dan merealisasikan tujuan tersebut. Dalam konteks ini, politik dianggap sebagai sebuah penyebaran informasi kepada masyarakat yang berisi usaha-usaha untuk mencapai tujuan suatu negara, dan juga meliputi pembentukan masyarakat yang diinginkan sebagai elemen dari perubahan sosial dan politik itu sendiri (dalam Fathurahman, 2021, hlm. 9).

Beberapa informasi yang disampaikan oleh Noer menunjukkan bahwa menurut pandangannya, politik tidak hanya terbatas pada aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan publik seperti yang diungkapkan oleh Miriam Budiardjo, tetapi juga meliputi Kegiatan yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial, seperti peralihan kekuasaan politik dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain. Dalam rangka memahami politik, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu: kekuatan dalam pemerintahan, pengakuan, struktur pemerintahan, tindakan dalam dunia politik, keterlibatan masyarakat dalam politik, jalannya proses pemerintahan, dan signifikansi mengenali elemen-elemen yang berkaitan dengan partai-partai politik. Ini membawa kita pada pemahaman bahwa politik berfungsi sebagai alat dalam menerapkan kekuasaan yang sangat berhubungan dengan pembentukan kebijakan dan keberlangsungan

kehidupan individu yang terlibat di dalamnya (dalam Fathurahman, 2021, hlm. 10-11).

### **2.3.2 Konsep Dasar Politik**

Ide-ide utama dalam kebijakan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang penting untuk public, Sjamsudin (1996, hlm. 5) menjelaskan bahwa: Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas bagi masyarakat. Ini bisa dipahami karena jumlah informasi semakin meningkat dan semua hal perlu dikenali dengan simbol yang disepakati. Metode yang dipakai adalah dengan merumuskan ide-ide yang membuat data lebih sederhana sehingga bisa dikelola dengan baik (Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 5). Ide ini perlu dimasukkan ke dalam pembelajaran tentang kewarganegaraan masyarakat. Dasar-dasar politik yang penting untuk diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan mencakup:

#### 1) Kekuasaan

Menurut Miriam Budiarjo: “Istilah kekuasaan merujuk pada kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tindakan orang lain, sehingga tindakan tersebut sesuai dengan harapan dan tujuan yang dimiliki oleh pihak yang berkuasa. Oleh sebab itu, kata 'kekuasaan' memiliki makna yang luas, karena setiap orang secara alami berperan sebagai pengaruh dan yang dipengaruhi dalam kekuasaan. Contohnya, seorang presiden merupakan pemimpin tertinggi (pihak yang berkuasa), namun dia juga harus mengikuti peraturan yang ada (pihak yang dipengaruhi)”, Budiardjo, 2000, hlm. 35 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 5-6).

Menurut Philip (2000: 820), kekuasaan memiliki tiga alasan utama yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dalam cara kita mendefinisikannya. Pertama, ada variasi dalam disiplin ilmu sosial yang menyoroti berbagai dasar kekuasaan, seperti harta, posisi, pengetahuan, daya tarik, kekuatan, dan wewenang. Kedua, terdapat variasi dalam jenis kekuasaan, termasuk pengaruh, paksaan, dan kontrol. Ketiga, cara kekuasaan digunakan juga berbeda, misalnya apakah digunakan untuk kepentingan individu atau masyarakat, serta untuk tujuan politik atau

ekonomi. Selain itu, diskusi tentang kekuasaan pada tahun 1950-an diwarnai oleh sudut pandang yang berbeda yang ditawarkan dalam teori-teori kekuasaan elit. (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 5-6).

## 2) Kedaulatan dalam Negara

Kata “kedaulatan” memiliki dua pengertian. Pertama, dalam konteks hukum konstitusi, kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan paling tinggi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah suatu bangsa. Kedua, kedaulatan dalam perspektif hukum internasional berarti bahwa kemandirian sebuah negara harus diakui oleh negara-negara lain.

Kekuasaan hukum "Sebuah negara yang diakui memiliki kekuasaan berdasarkan hukum dasar selalu merujuk pada kekuasaan ini. Artinya, Sebuah negara yang merdeka harus mengikuti aturan hukum yang ada di dalamnya. Tokoh penting dalam ide kedaulatan ini adalah Hugo Krabe yang mengungkapkan bahwa hukum memiliki kedaulatan, dan kedaulatan ini berdiri terpisah dari wewenang negara. Negara juga harus menghormati kedaulatan hukum, meskipun ini dapat bertentangan dengan keinginan negara. Kekuatan Negara Para ahli tentang kedaulatan negara, seperti Laband, Kelsan, Jhering, dan Jelineks, berargumen bahwa pemimpin suatu negara memiliki wewenang lengkap untuk mengelola pemerintahan. Hukum dasar negara mengungkapkan bahwa semua kekuasaan terletak pada pemerintah, dan "keinginan pemerintah merupakan sumber hukum yang paling penting." Ide ini dijelaskan dalam teori kedaulatan pemerintah. Kekuasaan total yang dimiliki oleh seorang pemimpin diatur oleh peraturan. Kekuatan tertinggi berada di tangan masyarakat. Makna kekuasaan tertinggi berasal dari warga, yang terlihat dari cara mereka menjalankan pemerintahan, seperti ketika masyarakat berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan regulasi yang berlaku di suatu negara melalui wakil-wakil mereka. Salah satu pemikir paling berpengaruh dalam ide kedaulatan, J.J. Rousseau, berpendapat bahwa: “Kedaulatan adalah keinginan masyarakat atau keinginan bersama (volonte generale)”.

Pengawasan sosial di dalam komunitas, Melaksanakan pengawasan sosial artinya adalah mengawasi tindakan masyarakat oleh institusi-institusi sosial yang berada di bawah pengawasan pemerintah untuk menciptakan ketertiban hukum di dalam komunitas. Ini adalah jenis layanan pemerintah yang secara langsung dirasakan oleh publik agar mereka dapat hidup dengan aman dan nyaman. Ajaran negara mengatakan bahwa kesepakatan sosial harus dijunjung tinggi agar pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dapat terwujud sesuai dengan keinginan semua kelompok masyarakat.

Teori mengenai kontrak sosial dikemukakan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau dalam buku mereka yang berjudul "Leviathan (1651-1652)". Dasar dari teori ini berasal dari pengalaman Thomas Hobbes yang merasakan situasi mengerikan akibat konflik antar warga. Masyarakat selalu terancam oleh kematian karena situasi yang kacau dan hidup dengan ketakutan akan serangan terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Karena pengalaman hidup yang selalu ditandai oleh kecemasan ini, mengundang individu-individu yang terlibat dalam perang saudara untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka melalui perjanjian damai. Kontrak yang dibuat oleh masyarakat untuk membentuk sebuah pemerintahan diharapkan dapat membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dengan ikhlas, warga menjalankan hak dan tanggung jawab mereka kepada pemerintah dengan harapan bahwa pemerintah akan menjaga hak dan tanggung jawab warganya.

Perjanjian sosial ini lalu diperluas oleh J.J. Rousseau (1762) yang berpendapat: "Pemerintahan pada awalnya merupakan kerjasama antara orang-orang kaya untuk menjaga harta mereka." Tapi, pada kontrak sosial yang sempurna, orang-orang bisa dengan bebas menukar kebebasan alami mereka dengan ikut serta dalam pemerintahan. Hal ini hanya bisa dicapai melalui sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi langsung, yang akan diatur oleh kehendak bersama. (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 7-8).

### 3) Negara yang Berdaulat

Kekuasaan politik terletak pada sebuah negara yang memiliki kedaulatan, sebab negara adalah organisasi tertinggi dalam kekuasaan politik yang dikelola oleh masyarakat di dalamnya. Peranan utama kekuasaan dalam suatu negara adalah mengelola hubungan antara masyarakat dan kelompok lain lewat undang-undang yang dibuat dan wajib diikuti oleh warga, guna mencapai kerjasama yang baik untuk mewujudkan sasaran dan impian negara tersebut. Negara akan memastikan kekuasaannya dengan melaksanakan peraturan yang ditetapkan untuk semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, agar kehidupan bersama yang diimpikan dapat tercapai. Tugas utama suatu negara meliputi:

Pertama, Mengatur dan memantau tindakan yang dianggap bisa membahayakan stabilitas dan keamanan negara dengan menerapkan aturan yang telah disepakati dan hukuman yang akan diberikan untuk pelanggaran yang terjadi. Kedua, Negara menentukan target dan rencana yang harus dilaksanakan bersama masyarakat sehingga tujuan-tujuan suatu negara dapat tercapai dengan baik. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan setiap anggota masyarakat dan mengorganisir aktivitas tersebut untuk mencapai visi nasional yang telah ditetapkan.

### 4) Pemerintah yang Berdaulat

Menurut Finer (1974), konsep pemerintahan terbagi ke dalam empat bagian. Pertama, pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh pihak berwenang yang mempunyai kekuasaan. Kedua, proses pemerintahan ini dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Ketiga, Tenaga kerja yang mengisi jabatan di lembaga pemerintahan. Keempat, metode yang digunakan pemerintah dalam mengatur manajemen yang berhubungan dengan masyarakat yang mereka pimpin (Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 9). Pemerintahan yang berkuasa tidak bisa dipisahkan dari fungsi instansi-instansi yang melaksanakan pemerintahan itu, yakni:

Fungsi badan legislatif dalam membuat undang-undang yang wajib diikuti oleh masyarakat, Fungsi badan eksekutif dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang yang dihasilkan oleh badan legislatif, Fungsi badan yudikatif dalam menegakkan dan mengawasi undang-undang yang telah disahkan.

#### 5) Legitimasi Kekuasaan

Definisi legitimasi adalah pengakuan atas kekuasaan dari seseorang yang telah dipilih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara itu. Peran legitimasi yang signifikan dalam kekuasaan akan membantu pemimpin dalam membuat keputusan untuk memperkuat dominasi mereka dalam pemerintahan. Namun, di sisi lain, pengakuan terhadap kekuasaan tidak memastikan bahwa anggota merasa puas jika cara pengambilan keputusan dianggap tidak sesuai dengan harapan dan permintaan dari para pendukung atau kelompok dalam pemerintah.

Berdasarkan pendapat Rosseau, legitimasi adalah konsep baru yang muncul setelah terjalannya perjanjian antara rakyat dan pemimpin. Dalam hal politik, kekuatan perjanjian ini dibandingkan dengan komitmen politik yang wajib dipatuhi oleh para pemimpin yang terpilih. Max Weber menyatakan bahwa: "sebuah legitimasi harus memiliki karakter yang sah, sesuai dengan hukum, dipenuhi emosi, bersifat mengikat, atau benar-benar terintegrasi dalam sistem tertentu; suatu pemerintahan atau negara dianggap sah jika memiliki hak untuk memimpin." (Scaff, 2000). Pernyataan yang dibuat oleh Max Weber memunculkan pertanyaan, bagaimana seorang pemimpin dapat memperoleh hak yang diberikan oleh masyarakat? Weber menjelaskan: "Ini hanyalah salah satu cara untuk melihat pandangan pribadi tentang legitimasi suatu sistem yang mendukung keabsahan sistem itu." (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 10-11).

Hak untuk mengatur dalam ide ini percaya bahwa pemilik hak memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan sesuai dengan hukum yang ada tanpa merugikan pihak lain, dan keputusan yang diambil harus

bersifat adil karena mengikat seluruh masyarakat dan pemerintah di negara tersebut. Empat cara untuk memperoleh pengakuan menurut Weber yaitu: 1) Kebiasaan, 2) Dampak dari komunitas, 3) Prinsip-prinsip yang logis, 4) Penerimaan terhadap kewenangan.

#### 6) Oposisi

Keberadaan kelompok yang oposisi atau partai yang tidak setuju dalam pemerintahan merupakan hal yang biasa dan sangat berarti dalam sistem pemerintahan. Oposisi yang kokoh memainkan peran yang krusial dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi, sebab mereka memberikan masukan yang penting serta berfungsi sebagai penyeimbang di dalam kekuasaan. Mereka juga mengevaluasi tindakan yang diambil oleh pemerintah jika terdapat ketidakcocokan dalam kebijakan yang ditetapkan. Kleden (2001) mengemukakan Bahwa: "Penolakan itu berharga tidak hanya untuk mengawasi kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai pelindung bagi pihak yang berseberangan yang sebenarnya membantu kita dengan terus menerus menguji kita. Dalam posisi ini, penolakan harus mengungkapkan kelemahan-kelemahan dari suatu kebijakan, sehingga ketika kebijakan itu diterapkan, semua potensi yang dapat menghasilkan dampak negatif sudah diminimalisir sebisa mungkin." (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 11).

Pada masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan oposisi dilihat sebagai rintangan yang selalu melawan keputusan yang diambil oleh pihak berkuasa. Pada waktu itu, ada pandangan yang mengatakan bahwa: "kekuasaan biasanya tidak hanya ingin memperbesar dan memperkuat kedudukannya, tetapi juga untuk memperkuat penguasaannya." Keberadaan oposisi dalam suatu pemerintahan sangat penting berkenaan dengan tanggung jawab yang perlu ditegakkan oleh pemerintah. Ini terjadi karena tidak semua pilihan yang diambil mencerminkan harapan masyarakat. Adanya kelompok ini mendorong pemerintah yang menganut paham demokrasi untuk lebih berhati-hati dalam menyusun kebijakan publik, dengan memberikan penjelasan tentang alasan di balik keputusan itu, landasan hukum, sasaran, dan pengaruhnya terhadap

masyarakat (Kleden, 2001). Dalam konteks ini, peran dari pihak oposisi dalam suatu pemerintahan adalah untuk memberikan masukan mengenai keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan memperingatkan tentang kemungkinan dampak negatif yang mungkin muncul, namun juga harus memberikan saran yang dianggap membantu bagi masyarakat (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 12).

#### 7) Sistem Politik yang berlaku

Istilah sistem politik mengacu pada cara pemerintah membuat keputusan terkait kebijakan umum. Elemen-elemen dalam sistem pemerintahan menunjukkan usaha dari kelompok-kelompok tertentu di suatu negara untuk meraih posisi dalam pemerintahan melalui proses pemilihan. Dalam sistem politik suatu negara, ada beberapa elemen yang diatur, yaitu: masyarakat, individu yang bekerja dalam pemerintahan, metode pemilihan pejabat publik, jenis pemerintahan, aturan umum, lokasi kekuasaan, dan pembagian kekuasaan ke berbagai daerah (Gibson, 1966, hlm. 565). Saat kita berbicara tentang sistem pemerintahan, kita sedang membahas cara masyarakat terorganisir dan bagaimana fungsi lembaga yang mendukung politik serta lembaga yang lebih tinggi dalam politik diatur., Haricahyono, 1991, (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 12).

#### 8) Demokrasi dalam Pemerintahan

Pemahaman tentang demokrasi pada dasarnya berkaitan dengan sistem pemerintahan yang melibatkan seluruh anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan. Penduduk diwakili oleh sejumlah anggota dewan yang mewakili mereka. Setiap pilihan yang diambil harus memperoleh persetujuan dari mayoritas anggota yang hadir. Setelah keputusan dibuat, para wakil rakyat ini juga harus secara aktif mengawasi penerapan kebijakan tersebut di masyarakat. Sistem pemerintahan yang demokratis adalah pernyataan yang menjanjikan untuk membangun tipe pemerintahan yang sempurna karena bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip demokrasi ini terus mengalami perubahan sejalan dengan

perubahan dalam konstitusi. Sebenarnya, sistem demokrasi bisa berkembang dengan baik di negara-negara yang menghargai hak individu untuk menyatakan pendapat mereka, yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keinginan mereka kepada penguasa. Hal ini terlihat dari keberadaan kelompok oposisi dalam pemerintahan yang berperan sebagai penyeimbang.

#### 9) Pemilihan Umum

Penerapan bentuk demokrasi di suatu negara terlihat dengan diadakannya pemilu untuk memilih pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan, serta untuk memilih anggota parlemen. Proses pelaksanaan pemilihan umum dianggap sebagai cara yang efektif untuk menentukan para pemimpin pemerintah, yang merupakan hal krusial dalam demokrasi; bahkan di negara-negara Eropa, acara ini dilakukan untuk memilih pejabat publik. Perkembangan sistem demokrasi tidak hanya berlangsung di negara-negara Barat, tetapi juga menyebar dan diterima oleh berbagai negara lainnya di seluruh dunia. Dari kesuksesan pemilihan umum ini, muncul pertanyaan tentang seberapa penting pemilihan umum dalam menentukan pemimpin publik.

Rosse dan Mosawir, 1967, (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 13-14). menyatakan: “Dari pemilihan umum, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai: 1) untuk menciptakan pemerintahan yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung; 2) sebagai sarana komunikasi antara warga dan pemerintah; 3) untuk menilai seberapa besar dukungan masyarakat kepada para pemimpin; 4) sebagai cara untuk memilih pemimpin politik; 5) untuk meningkatkan perhatian pemerintah terhadap kebutuhan rakyat.” Pemilu dapat dilaksanakan jika ada elemen-elemen: 1) Ada warga negara yang menjadi peserta pemilu, 2) Ada kelompok politik yang membantu dalam pemilihan pejabat publik, 3) Ada mekanisme pemilihan umum yang diterapkan untuk menentukan jumlah kursi di lembaga legislatif.

#### 10) Partai Politik

Partai politik merupakan kelompok individu yang memiliki tujuan dan gagasan yang serupa dalam mengungkapkan harapan mereka kepada pemerintah. Tujuan keberadaan mereka ini adalah untuk meraih posisi dalam pemerintahan, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun mengambil alih. Dengan memasuki posisi dalam pemerintahan, anggota-partai tersebut memperoleh kesempatan untuk menduduki jabatan tertentu. Umumnya, usaha para anggota partai politik mempunyai sasaran, prinsip, dan arah yang hampir sama, yaitu untuk menjaga atau mendapatkan kekuasaan agar mereka dapat merancang atau mengimplementasikan kebijakan publik sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan, Budiardjo, 2000, (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 14).

Definisi diatas mendapat tanggapan dari Schlesinger (1968) yang mengatakan: “Tiga kategori organisasi yang biasanya disebutkan oleh berbagai partai. Pertama, organisasi yang terlalu kecil untuk menciptakan perubahan signifikan dengan tujuan mendapatkan posisi publik, terutama jabatan eksekutif, namun tetap mencalonkan kandidat dan berpartisipasi dalam pemilu. Kedua, ada partai-partai revolusioner yang bercita-cita untuk menghapuskan pemilihan yang bersifat kompetitif. Ketiga, terdapat kelompok yang menguasai dalam rezim otoriter yang memiliki sistem satu partai. Meskipun beberapa kategori tambahan telah diperkenalkan dan definisi partai politik telah diperluas, masih terdapat kesulitan, terutama dalam membedakan partai politik dari kelompok kepentingan. Hal ini disebabkan karena, kelompok kepentingan terkadang juga bisa mencalonkan kandidat untuk posisi publik tanpa perlu mengubah identitas mereka menjadi partai politik.”.

#### 11) Persamaan Hak dan Kewajiban

Menurut Halsey, 2000, hlm. 303 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 15-16): “Di bidang matematika, kata 'persamaan' menggambarkan ide tentang hubungan yang rumit, dengan sifat yang berbeda-beda mulai dari identitas sampai dengan hubungan antar variabel, tanpa menyertakan

nilai atau moral. Sebaliknya, dalam ilmu sosial, terutama dalam politik, konsep persamaan penuh dengan nilai-nilai. Konsep ini berkaitan dengan prinsip-prinsip pengorganisasian komunitas manusia, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Jefferson, bahwa setiap individu memiliki posisi yang setara sebagai bagian dari masyarakat.” Selama bertahun-tahun, para ilmuwan sosial telah berusaha memahami arti dari istilah kesetaraan, yang menghasilkan pertanyaan, “apakah persamaan di sektor ekonomi, politik, dan sosial dapat terwujud, dan seberapa besar peluang untuk itu dapat terjadi?” Terkait dengan pertanyaan tersebut, jawabannya saat ini masih belum mencapai kesepakatan, karena ada berbagai ahli yang melihat persamaan ini sebagai fenomena yang alami atau hukum yang ada di alam, sementara yang lainnya memandangnya sebagai sebuah hasil ciptaan sosial manusia yang harus diperjuangkan.”.

## 12) Hak Asasi Manusia

Rosalyn Higgins menekankan bahwa: "Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diperoleh oleh setiap individu sesuai dengan kondisi yang bersifat manusiawi" Oleh karena itu, hak-hak tersebut tidak dianggap sebagai anugerah dari pemerintah yang dapat dengan gampang dihapus melalui aturan hukum. Walaupun terdapat perbedaan dalam sistem hukum, hak asasi manusia yang dimiliki individu adalah hak yang diakui secara global dalam hukum internasional” Menurut Higgins, 2000, hlm. 303 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 18): “Secara mendasar, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap regulasi hukum yang mereka miliki mencerminkan serta melindungi hak asasi manusia global yang berlaku dalam batasan yurisdiksi mereka. Hak asasi manusia mencakup tidak hanya hak sipil dan politik, tetapi juga hak ekonomi, sosial, dan budaya, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam aspek hak asasi manusia tersebut, terdapat perdebatan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju.” Secara umum, komunitas global telah mengakui hak-hak asasi manusia, yang diuraikan dalam berbagai dokumen, termasuk "Kovenan Internasional mengenai Hak Asasi

Manusia 1966," yang mengacu pada "Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948." Dokumen "International Covenant on Civil and Political Rights" juga mencerminkan hal ini, yang telah disepakati oleh lebih dari 140 negara. Sejak dirilisnya dokumen hak asasi manusia ini pada awal 1990-an, ide tentang universalitas hak asasi manusia mulai berkembang secara bertahap.

### **2.3.3 Pengertian Pendidikan Politik**

Keberadaan seseorang sebagai bagian dari masyarakat yang diberikan kemampuan untuk berpikir dan menciptakan inovasi dalam menciptakan peradaban serta budaya di seluruh dunia. Seseorang dapat memberikan dampak pada peradaban global akibat kesadaran diri yang mendorong mereka untuk menjadikan lingkungan di sekitarnya lebih maju dan berkembang. Namun, untuk melaksanakan perubahan ini, dibutuhkan sebuah strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan tersebut dapat dirancang oleh seorang pemimpin, namun untuk mendapatkan kekuasaan, seseorang perlu melalui proses politik. Untuk mengerti tentang politik, kita perlu memulai dengan mempelajari pendidikan politik. Ketika kita mempelajari pendidikan politik, hal pertama yang harus kita ketahui adalah dua konsep yang terkandung di dalamnya, yaitu pendidikan dan politik. Setiap kata mempunyai arti yang khas. Dalam hal arti asalnya, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin, yaitu *educare*, yang diartikan sebagai pelatihan. Dalam konteks pertanian, *educare* mengacu pada proses memperbaiki tanah supaya menjadi subur. Menurut Khan (2001, hlm. 12), Pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang terdapat dalam diri manusia agar dapat tumbuh dengan optimal dan memberi manfaat bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 20).

Berdasarkan pandangan Pancasila, guna memperbaiki mutu sumber daya di Indonesia melalui bidang pendidikan, tujuan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam "Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa pendidikan adalah sebuah usaha yang direncanakan dan sadar untuk menciptakan lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif

mengembangkan potensi diri mereka untuk memiliki kekuatan spiritual yang berhubungan dengan agama, kemampuan untuk mengontrol diri, sifat kepribadian, kecerdasan, etika yang baik, serta keterampilan yang diperlukan untuk individu, masyarakat, bangsa, dan negara”.

Dalam tulisan Mahfud MD (2004, hlm. 19), dijelaskan bahwa: “mendidik merupakan usaha untuk menghumanisasi manusia. Menghumanisasi manusia artinya mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam individu, termasuk potensi intelektual, kepribadian, emosional, spiritual, serta sosial.” Al Muchtar juga mengungkapkan: “Pendidikan menawarkan berbagai kesempatan untuk menciptakan situasi yang mendukung pertumbuhan potensi individu dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan, dan kemampuan untuk mengembangkan etos kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.” Selanjutnya, Mahfud MD (2009, hlm. 32) menyatakan bahwa: “*Dictionary of Education* mengartikan pendidikan sebagai proses di mana seseorang melatih kemampuan, sikap, dan perilaku lainnya dalam masyarakat tempat ia berada. Ini adalah suatu proses sosial yang menuntut seseorang untuk terkena dampak dari lingkungan yang dipilih dan teratur, sehingga ia bisa mencapai pengembangan keterampilan sosial dan pribadi yang maksimal.” Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut, bisa disimpulkan bahwa Pendidikan merupakan aktivitas krusial yang dilakukan sebagai upaya untuk mengubah individu agar dapat meningkatkan dan mengolah potensi yang ada pada diri mereka, yang pada akhirnya akan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi pergeseran di masa mendatang. Paulo Freire berpendapat bahwa: “pendidikan bertujuan untuk membentuk individu yang mampu dan berani bertindak sebagai suara zaman.” Selanjutnya Freire (2004, hlm. 5) menegaskan, “Pendidikan berperan sebagai contoh dan sarana untuk perubahan sosial dalam upaya membangun komunitas yang baru. Melihat pendidikan sebagai sebuah contoh menandakan pentingnya untuk membahas berbagai elemen politik dan budaya secara mendalam, melampaui batasan teori dari doktrin politik tertentu, serta menggarisbawahi hubungan antara teori, realitas sosial, dan hakikat dari pembebasan yang sejati. Dalam perspektif aktor dan perubahan,

pendidikan memiliki tiga makna, yaitu (1) sebagai wadah untuk membahas isu politik dan kekuasaan dengan mendalam, karena pendidikan berperan sebagai tempat di mana arti, harapan, bahasa, serta nilai-nilai kemanusiaan bersatu; (2) sebagai tempat untuk menjelaskan keyakinan yang lebih dalam terkait definisi manusia dan aspirasinya, dan (3) sebagai sarana untuk merancang dan memperjuangkan masa depan,” (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 22).

Dalam pemahaman pendidikan politik, selain istilah pendidikan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada juga istilah politik yang merujuk pada keberagaman. Politik biasanya dibahas bersamaan dengan negara, dan seiring berjalannya waktu, pandangan tentang politik semakin bervariasi. Aristoteles, yang dikutip oleh Agustino (2007, hlm. 5), menyatakan bahwa: “Selain pendidikan, dalam bidang pendidikan politik juga ada konsep penting lainnya, yaitu politik. Politik memiliki beragam definisi. Kebanyakan ilmuwan memandang politik sebagai aspek pemerintahan. Namun, seiring dengan kemajuan global dan munculnya kejadian baru dalam dunia politik, pengertian mengenai politik semakin bervariasi. Cara paling sederhana untuk mengerti politik adalah dengan menggali asal kata dari istilah politik itu sendiri, yaitu polis, yang menunjukkan sebuah tempat di zaman kuno Yunani yang, berdasarkan pandangan Aristoteles, didefinisikan sebagai kota terideal. Aristoteles menyatakan bahwa studi politik tidak hanya tentang menjelaskan karakteristik kota yang sempurna, tetapi juga mengkaji sifat-sifat umum dari kota serta bentuk pemerintahan yang ada, yang dia sebut sebagai politeiai.” (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 27).

Pendapat Mitcell dalam Supardan (2008:60) menyatakan bahwa "politik adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara kolektif atau pembuatan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat secara umum." Pendapat ini dikuatkan oleh Deutsch yang dicantumkan dalam Supardan (2008, hlm. 70), yaitu “politik diartikan sebagai pembuatan keputusan dalam cara yang terbuka.” Pandangan ini mengindikasikan bahwa politik selalu berhubungan dengan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk kepentingan publik. Sebaliknya, David Easton, sebagaimana dijelaskan oleh

Supardan, menyatakan bahwa: “ilmu politik adalah kajian tentang pembuatan kebijakan publik,” yang berarti politik adalah studi mengenai pengembangan kebijakan publik. Di sisi lain, Dahl berpendapat bahwa: “politik adalah hubungan yang kuat yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan, dan otoritas secara eksplisit.” Berbagai pandangan dari para ahli ini menjadi perspektif yang berbeda dalam cara membagi kekuasaan (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 27).

Dalam menampilkan diri dan meningkatkan kemampuan individu yang mandiri untuk memperbaiki kehidupan sosial sebagai warga negara, Sebaiknya, fokuskan pendidikan politik kepada orang dewasa sebagai bagian dari proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan serta potensi individu dalam berekspresi agar menjadi lebih inovatif dan kreatif demi kemajuan bangsa dan negara. Menurut Holdar dan Zakharchenko, 2002, hlm. 45 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 28), mereka mengatakan: “Pendidikan politik adalah suatu elemen dari pengajaran untuk orang dewasa, yang bertujuan mengasah keterampilan individu dalam menjadi orang yang bebas dan mandiri, serta memperbaiki aspek sosialnya sesuai dengan perannya sebagai anggota komunitas. Pendidikan politik berfungsi sebagai jenis pendidikan yang bersifat umum, yaitu usaha untuk melibatkan masyarakat dalam komunitas guna menciptakan budaya partisipasi”. Gieseke yang dikutip oleh Kartono, 1989, hlm. 30 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 28), menyatakan: “Pendidikan politik dapat dipahami melalui konsep *politische bildung* yang terdiri dari *bildungswissen*, *orientierungswissen*, *verhaltungswissen*, dan *aktionswissen*. Pendidikan politik itu sendiri adalah *bildungswissen*, yang menunjukkan pengetahuan tentang karakteristik dan gambaran manusia (*mensbeeld*) serta perubahan yang terjadi, serta pengetahuan mengenai budaya negara kita, sehingga: 1. individu mengetahui potensi diri serta kemampuan suatu negara; 2. mengenali identitas bangsa; 3. memiliki rasa percaya diri yang kuat; 4. mampu mengatasi rasa rendah diri dan ketergantungan pada kekuatan atau negara lain; 5. memahami dengan baik potensi bangsa sendiri, cara pandang, dan

filosofi hidup (dalam konteks ini Pancasila) yang dijadikan sebagai pedoman dalam usaha mencapai tujuan kehidupan yang sejahtera bagi bangsa.”.

Menurut Ruslan, 2000 (dalam Wibowo dan Darmawan, 2021, hlm. 5), pendidikan politik merupakan elemen dari pendidikan sosial secara keseluruhan. Melaksanakan kegiatan ini menghasilkan beragam pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk berpartisipasi sebagai anggota dalam suatu komunitas sosial atau masyarakat, dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai Islam berakar dari prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, amanah, dan perhatian terhadap orang lain. Nilai-nilai ini penting tidak hanya dalam konteks kepemimpinan politik tetapi juga dalam menciptakan tata kelola yang bersih yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan mengintegrasikan ajaran Islam dalam proses pengembangan calon pemimpin, diharapkan dapat tercipta generasi pemimpin yang mampu menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan etika.

Selain itu, Kartono (dalam Prasetyo, 2021, hlm. 22-23) mengelompokkan definisi pendidikan politik menjadi dua jenis, yaitu pendidikan politik yang ditujukan untuk kader partai atau para politisi, dan pendidikan politik yang mencakup seluruh aspek politik. Dalam konteks yang lebih spesifik, hal ini mencakup penyediaan pendidikan bagi generasi muda agar mereka siap menjadi kader politik yang mampu bersaing dan berhasil dalam dunia politik. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan politik merupakan usaha pendidikan yang dirancang untuk membentuk individu dengan karakter dan kesadaran politik yang tinggi, serta dapat berperan aktif sebagai peserta yang bertanggung jawab demi mencapai tujuan politik masyarakat, bangsa, dan negara. Sangat krusial bagi generasi muda untuk menerima pendidikan politik, mengingat keragaman situasi masyarakat, di mana banyak dari mereka masih kurang memahami tentang politik. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan.

Dalam bahasa Inggris, istilah yang berkaitan dengan pendidikan politik adalah "political socialization". Supriyadi (1999, hlm. 70) menjelaskan: "istilah pendidikan politik dan sosialisasi politik memiliki arti yang mirip atau

sangat dekat, sehingga dapat saling dipertukarkan". Alfian berpendapat (1996, hal. 64) bahwa: "sosialisasi politik bisa dipandang sebagai sebuah bentuk pengajaran politik dalam pengertian yang lebih luas. Makna yang lebih dalam dari pendidikan politik adalah usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengubah cara sosialisasi politik di masyarakat, sehingga mereka benar-benar dapat memahami dan merasakan nilai-nilai dalam sistem politik yang ideal yang ingin diwujudkan", Dalam kesempatan yang sama, Rusadi Kantaprawira (1988, hlm. 54) menyatakan bahwa: "pendidikan politik adalah usaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai politik sehingga mereka bisa berpartisipasi secara optimal dalam sistem politik, sesuai dengan asas kedaulatan rakyat atau demokrasi yang menekankan bahwa masyarakat harus dapat melaksanakan perannya dalam keterlibatan.". Kosasih Djahiri (1995, hlm. 18) juga mengemukakan pendapatnya: "pengajaran mengenai politik merupakan suatu proses mendidik atau mengembangkan, yang mengajarkan masyarakat untuk memahami, mencintai, dan memiliki ikatan yang mendalam terhadap negara, bangsa, serta semua lembaga yang ada." (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 58).

Peraturan mengenai pendidikan politik di Indonesia dijelaskan dalam Inpres Nomor 12 Tahun 1982 yang membahas "Pendidikan Politik untuk Generasi Muda." Dalam dokumen tersebut, dikatakan bahwa pendidikan politik untuk generasi muda merupakan serangkaian usaha yang fundamental untuk meningkatkan dan memperkuat kesadaran politik serta rasa cinta terhadap tanah air demi mempertahankan keberlangsungan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar budaya politik negara. Pendidikan politik harus menjadi komponen krusial dalam perubahan yang berlangsung di ranah politik Indonesia saat ini, dengan aspirasi untuk mendirikan sebuah sistem politik yang sepenuhnya demokratis, stabil, dinamis, serta efisien dan berdampak. Al-Khumaisi, dalam tesis masternya, menjelaskan bahwa pendidikan politik mencakup aktivitas baik formal maupun informal yang bertujuan membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir secara mandiri tentang hukum dan kekuasaan. Ia juga berusaha menyampaikan kepada mereka pemahaman tentang isu-isu terbaru di berbagai tingkat, mulai

dari regional hingga internasional. Kegiatan ini diharapkan dapat membentuk dan memperkaya wawasan, nilai-nilai, serta kerangka yang mendukung peningkatan keterlibatan politik individu, cara berpikir masyarakat, serta tujuan dan manfaat yang ada. Dalam melaksanakan peran mereka dalam masyarakat, kelompok elit politik perlu memiliki pemahaman mengenai politik sebagai dasar untuk menerapkan kehidupan demokratis, sehingga mereka dapat mengenali dan menghargai hak serta kewajiban warga negara dalam mengekspresikan harapan mereka kepada pemerintah.

#### **2.3.4 Tujuan dan Fungsi Pendidikan Politik**

Pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, merangsang inovasi, dan memberikan kesempatan bagi individu untuk berperan secara konstruktif dalam kegiatan politik dan pembangunan. Sasaran dari upaya ini adalah untuk membangun rasa tanggung jawab dalam ranah politik untuk bangsa dan negara, serta membina karakter, kesadaran, dan keterlibatan politik di kalangan warga masyarakat. Suharto menyoroti pentingnya pendidikan politik dalam membentuk identitas politik suatu komunitas dan menciptakan situasi politik yang mendukung. Pandangan Soeharto sejalan dengan pemikiran Ruslan mengenai tujuan pendidikan politik, yaitu untuk membangun dan meningkatkan kesadaran serta identitas politik, serta mengasah keterampilan berpartisipasi dalam aktivitas politik, demi memberikan kontribusi yang baik sebagai bagian dari masyarakat politik (Sahib, A. 2023, hlm. 50).

Ruslan menekankan bahwa aspek politik adalah inti dari pendidikan politik, karena ini sangat penting untuk kesadaran dan partisipasi dalam urusan politik. Wahab berpendapat bahwa sasaran pendidikan politik adalah untuk melahirkan individu yang berkualitas, yang dapat memahami dan menjalankan hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Unsur politik juga dipengaruhi oleh tradisi politik yang diyakini. Hal ini dapat terjadi jika setiap individu mengerti tentang politik, memiliki wawasan politik, dan mampu terlibat dalam politik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, pendidikan politik menjadi elemen yang sangat krusial untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Menurut pandangan

Affandi, sasaran dari kebijakan pendidikan di Indonesia adalah untuk membangun generasi muda sehingga mereka dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk meningkatkan rasa peduli dan partisipasi mereka dalam proses pembangunan negara. Ini melibatkan pemberian pengetahuan serta kemampuan yang cukup dalam bidang politik untuk partisipasi yang beretika dalam urusan politik. Ini sejalan dengan perspektif yang akan dijelaskan berikutnya oleh Brownhill dan Smart:

*“Indonesia's educational politics seek to steer the youth in civic and national matters, encouraging them to be aware and involved in the country's progress. This entails offering political insights and abilities for active participation, with the goal of boosting awareness and aligning the nation's values with its path.”.*

Pendidikan politik memainkan peran yang sangat signifikan dalam menilai seberapa baik sistem politik berfungsi di Indonesia. Ini melibatkan keterlibatan masyarakat dan merancang masa depan negara dengan mengutamakan nilai-nilai politik yang tepat. Untuk mencapai target ini, diperlukan kesadaran serta kerja sama dari institusi publik dalam sebuah sistem pemerintahan yang baik. Dengan melibatkan lembaga dan bagian dari masyarakat, keseimbangan dalam bidang sosial dan pemerintahan bisa tercapai melalui pendidikan serta sosialisasi politik. Pendidikan politik di Indonesia harus lebih menekankan pada peningkatan kesadaran politik dan masalah-masalah kebangsaan, mengedepankan Pancasila dan UUD 1945, serta melaksanakan pembaruan dalam kehidupan politik negara untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, baik, dan berkembang secara dinamis.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono, 1996, hlm. 68 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 60) adalah sebagai berikut:

- 1) Membentuk masyarakat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
  - a) memahami situasi sosial dan politik yang banyak konflik;

- b) secara jelas memberikan saran yang membangun untuk masyarakat yang damai;
  - c) kegiatan diarahkan untuk meningkatkan demokrasi bagi perorangan, semua kelompok di masyarakat, dan lembaga pemerintahan;
  - d) mendukung kepentingan dan ide tertentu, terutama yang berkaitan dengan keamanan dan kesejahteraan bersama.
- 2) Memperhatikan dan berusaha, yaitu:
- a) setiap orang berfungsi sebagai anggota masyarakat (mengaktualisasikan diri dari sudut sosial);
  - b) meningkatkan semua bakat dan kemampuannya (dari segi pemikiran, pengetahuan, kemampuan berpikir kritis, sikap yang baik, dan keterampilan dalam berpolitik);
  - c) agar orang dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik, untuk pengembangan diri, komunitas, bangsa, dan negara.

M. Nur Khoiron, 1999, hlm. 11 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm.

- 61) menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik mencakup hal-hal berikut:
- 1) Mengupayakan peningkatan pengetahuan, ketertarikan, dan keterlibatan dalam pemerintahan di tingkat lokal, daerah, dan nasional, sekaligus mendukung langkah-langkah dan tujuan yang ditetapkan oleh kelompok masyarakat sipil.
  - 2) Meneliti pemahaman mengenai pokok-pokok sejarah, pemikiran, politik, sosial, ekonomi, sistem demokrasi, dan hukum fundamental, baik di Indonesia maupun di negara-negara Barat.
  - 3) Membangun kesepakatan dan bantuan yang kuat terhadap dasar dan nilai-nilai utama yang ada dalam dokumen seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan konvensi lainnya, UUD 1945, Pancasila, juga Sumpah Pemuda, yang telah menyatukan kita sebagai satu bangsa dan berkontribusi pada peningkatan kinerja.
  - 4) Meningkatkan pemahaman mengenai seberapa krusial lembaga dan prinsip-prinsip masyarakat dalam memperjuangkan pemerintahan yang adil, setara, dan bertujuan kemanusiaan di Indonesia.

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono, 1996, hlm. 57 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 60) adalah memberikan kontribusi signifikan untuk hal-hal berikut ini:

- 1) Perbaiki sistem demokrasi yang lebih baik bagi setiap orang dan susunan sosial mereka.
- 2) Dengan dasar yang nyata, lebih terhormat, dan sesuai dengan aturan resmi dalam menciptakan hubungan politik yang modern.

Pendidikan politik memiliki peranan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman mereka terkait kehidupan politik sehingga diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan hak dan kewajiban mereka secara optimal. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan politik ini adalah untuk memodifikasi sikap dan cara berpikir masyarakat, sehingga mereka lebih bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka sebagai individu di dalam kerangka negara dan pemerintahan. Mendorong partisipasi mereka dalam setiap kegiatan politik, dan bekerja lebih keras untuk mengubah pandangan masyarakat secara keseluruhan agar mereka lebih memahami peran mereka sebagai individu yang terlibat dalam politik.

### **2.3.5 Sejarah Pendidikan Politik di Indonesia**

Pendidikan Politik setiap periodenya memiliki perkembangan maka dari setiap masa nya pasti memiliki poin krusial dalam penanaman nilai politik, maka perlu di uraikan terkait sejarah perkembangan pendidikan politik dari masa ke masa.

#### **1) Pendidikan Politik Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan**

Untuk meningkatkan status sosialnya dan martabat masyarakatnya, pemerintah perlu menyediakan pendidikan politik bagi generasi muda sebagai cara untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan dan mengekspresikan diri agar dapat menjadi individu yang mandiri. Sepanjang sejarahnya, “pendidikan politik di Indonesia telah menjalani perjalanan panjang, sejak sebelum kemerdekaan” hingga era reformasi. Dengan pengalaman sejarah yang kaya dan bervariasi ini, Pemerintah

akan merujuk pada hal itu ketika menentukan bahan yang paling tepat untuk digunakan sebagai panduan dalam setiap periode yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum politik. Tujuan utama dari pendidikan politik adalah untuk mengubah dan memindahkan cara kerja sistem politik agar demokrasi bisa berjalan dengan adil, namun pendidikan politik juga sering digunakan sebagai alat untuk mendukung seseorang agar tetap berkuasa dengan menerapkan tatanan sosial dalam sistem politik. “Pendidikan politik di tanah air memiliki perjalanan yang panjang, dimulai sejak sebelum bangsa ini merdeka, melewati era Orde Lama, Orde Baru, dan terus berlanjut hingga masa Reformasi. Dari berbagai pengalaman dalam pendidikan politik tersebut, bisa dilihat isu-isu yang menjadi fokus di setiap zaman dan pendekatan yang diambil oleh penguasa untuk memberikan pemahaman kepada rakyat mengenai politik”.

Pendidikan politik di Indonesia berkaitan dengan sejarah masa lalu, di mana proses pembelajaran pendidikan politik fokus pada perjalanan sistem politik yang diterapkan pada setiap periode. “Sejarah dianggap sebagai kandungan utama dalam pendidikan politik. Sejarah bangsa Indonesia sangat penting karena dengan mempelajari berbagai peristiwa sejarah, kita dapat lebih memahami bagaimana pendidikan politik berfungsi di masa lalu dan dampak yang ditimbulkannya. Dari sejarah, kita juga dapat mengetahui peran yang dimainkan oleh generasi muda Indonesia di berbagai periode dan sejauh mana usaha mereka dalam mengabdikan untuk negara serta untuk kehidupan pribadi mereka.” Prinsip utama dari keberhasilan sistem politik yang dahulu dianggap sebagai pelajaran bagi generasi muda berikutnya dan dijadikan referensi untuk menemukan kegagalan sistem yang dianggap tidak sesuai sehingga tidak termasuk dalam rencana belajar pendidikan politik. "Di Indonesia, pendidikan politik telah ada jauh sebelum kemerdekaan negara ini. Sejak tahun 1908, saat kebangkitan nasional, gagasan tentang keberadaan Indonesia yang diharapkan mulai diperkenalkan kepada masyarakat di seluruh tanah air.". Setelah meraih kemerdekaan, informasi mengenai

pendidikan politik mulai dikenalkan dan diterima oleh masyarakat. Munculnya partai-partai politik dan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu 1955 adalah bukti nyata dari pendidikan politik yang diterima oleh rakyat. Secara resmi, pendidikan politik dimasukkan ke dalam kurikulum di setiap sekolah di Indonesia melalui mata pelajaran yang berkaitan dengan kewarganegaraan.”.

Pada saat kebangkitan nasional di tahun 1908, Indonesia telah mempersiapkan materi pendidikan politik. Pada periode ini, pemerintah mulai menanamkan kepada masyarakat tentang "cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia". Reaksi masyarakat sangat positif, karena mereka diperbolehkan untuk membentuk organisasi partai politik dan meningkatkan kesadaran publik terkait "pemilihan umum pertama yang dilaksanakan pada tahun 1955." Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum yang pertama ini menunjukkan bahwa "pendidikan politik yang diberikan" melalui pendirian Budi Utomo pada 20 Mei 1908 telah menciptakan sejarah pergerakan nasional yang mendukung masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, dengan membentuk partai politik serta berkembangnya organisasi politik dan "gerakan lain yang secara terbuka beroperasi di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama." Munculnya gerakan politik ini menjadi simbol persatuan bangsa dalam melawan penjajahan Belanda terhadap rakyat. Tujuan dari pembentukan organisasi dan gerakan politik tersebut adalah untuk menguatkan rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia serta menanamkan kesadaran melalui pengaktifan semangat kebangsaan guna memperkuat rasa patriotisme dalam perjuangan meraih kemerdekaan, yang terlihat dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. "Dalam Sumpah Pemuda ini, nilai persatuan dan cita-cita kemerdekaan semakin terlihat jelas, yang menunjukkan bahwa nilai politik yang telah diajarkan sebelumnya menjadi lebih berarti dan mendidik masyarakat mengenai hak mereka untuk bebas dari penjajahan dan penindasan." Pemberian tersebut kepada masyarakat telah membawa kemajuan yang signifikan.

Masuknya "bala tentara Jepang ke Indonesia pada tahun 1942" menggantikan kekuasaan Belanda di Indonesia, memperkenalkan ideologi fasisme, tetapi masyarakat Indonesia tetap berusaha mempertahankan dan menyebarluaskan nilai-nilai politik. Praktik kolonial yang dilakukan Belanda seolah-olah dilanjutkan oleh kolonial Jepang saat menjajah bangsa Indonesia. Selama Perang Dunia II, nilai-nilai yang diberikan kepada masyarakat Indonesia semakin menguat, sehingga keinginan masyarakat Indonesia untuk merdeka semakin tumbuh, terutama setelah kabar bahwa Jepang kalah dari sekutu, memberikan peluang besar untuk merebut kemerdekaan. Pencapaian kemerdekaan Indonesia mencerminkan persatuan masyarakat Indonesia yang bertekad untuk memperoleh kebebasan dari penindasan selama berabad-abad. Semua ini terjadi karena puluhan tahun sebelum kemerdekaan diraih, nilai-nilai politik telah ditanamkan kepada masyarakat Indonesia melalui pendidikan politik yang disebarluaskan oleh pemerintah. Dalam menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai politik, para pemimpin Indonesia telah merencanakan jauh ke depan sebagai dasar pendidikan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan bernegara di Indonesia. Sikap patriotisme yang mendukung semangat idealisme dan nasionalisme menjadi prinsip hidup yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan yang bebas dari pengaruh negara lain.

Setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, pemerintah mulai mengedukasi masyarakat tentang politik agar dapat berkembang dan berlangsung terus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini disebabkan oleh beragam tantangan untuk terus memperjuangkan kepentingan bangsa. Di Indonesia, hak dan kewajiban warga negara dalam politik adalah setara, yang berarti setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam urusan politik, kecuali jika hak politiknya dicabut oleh pemerintah. Dalam pesannya, Presiden Sukarno menyatakan bahwa pembangunan di Indonesia adalah tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, revolusi di Indonesia adalah pembebasan dari penjajahan, serta

didirikannya tiga pilar utama, yaitu 1) membangun negara kesatuan Indonesia yang bersifat demokratis, 2) menegakkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, 3) menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia untuk menciptakan perdamaian dan menghapus segala bentuk penjajahan.

Semangat perjuangan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari ditekankan pada pemahaman mengenai nilai-nilai politik untuk mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Walaupun ada banyak tantangan dalam penerapannya di masyarakat, pendidikan politik diupayakan supaya dimengerti oleh semua elemen masyarakat agar mereka bisa mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu, pendidikan politik bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik antar kelompok yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang bisa memicu gerakan ekstrem dengan mengandalkan dukungan massa, sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan dalam proses politik negara.

Pada masa Orde Lama, ada gerakan politik yang memanfaatkan dukungan kekuatan mereka, yang seringkali mengakibatkan konflik dan gesekan fisik antar kelompok. Selama pemerintahan parlementer, semua kelompok diberikan kesempatan untuk merekrut kader politik hingga ke daerah terpencil. Pemasyarakatan nilai politik awalnya ditujukan untuk mengalihkan semangat perjuangan kemerdekaan menjadi usaha untuk mengisi kemerdekaan dan kemajuan kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa pemasyarakatan nilai politik tidak berjalan sesuai harapan. Munculnya berbagai konflik politik dalam masyarakat dan penyalahgunaan Pancasila serta UUD 1945 dalam pemerintahan menunjukkan bukti adanya kehidupan politik yang tidak benar dan menyimpang dari cita-cita proklamasi.

Berdirinya berbagai kelompok politik pada waktu itu juga menimbulkan ekstremisme tertentu dalam gerakannya, yang kadang-kadang menggunakan kekuatan fisik untuk memenangkan konflik dan

berusaha meningkatkan dukungan massa, sehingga semakin memperburuk kekacauan politik pada masa Orde Lama. Sistem pemerintahan liberal parlementer pada waktu itu memberikan kesempatan luas bagi semua kelompok politik untuk melakukan kaderisasi hingga ke desa dan wilayah terpencil. Pemasyarakatan nilai politik yang berlangsung saat itu lebih banyak diarahakan untuk memperkuat keyakinan dan orientasi politik kelompok yang ada, yang menyebabkan munculnya fanatisme sektoral, oportunistik politik, serta aliran politik yang sangat ekstrem dan agresif, terutama komunisme dan ideologi keagamaan tertentu, yang kemudian dikenal sebagai ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Namun, kenyataannya adalah munculnya gerakan ekstrim kiri dan ekstrim kanan karena kaderisasi politik hanya dilakukan untuk memperkuat kelompok dalam menyebarkan ideologi mereka, yang mengakibatkan fanatisme sektoral terhadap kelompok atau tokoh tertentu. Di samping itu, oportunistik dan aliran politik ekstrem, terutama dari golongan komunis dan ideologi keagamaan, membuat masyarakat menjadi fanatik terhadap kelompok tertentu.

Kondisi ini berlangsung hingga akhir zaman Orde Lama sehingga muncul pemberontakan komunis yang dikenal dengan G 30/SPKI pada tahun 1965, dipicu oleh gerakan subversi menentang kekuasaan akibat lama-nya mereka mengalami penjajahan serta beragam pengaruh asing yang kurang disaring dengan baik, ditambah dengan konflik internal karena perbedaan pandangan politik dan tetap mempertahankan sifat kedaerahan serta perbedaan keyakinan. Kebiasaan memberontak terhadap penguasa sering dialami oleh para pendukung kelompok ekstrem karena terbiasa dengan pola hidup di negara yang sedang dijajah, serta memengaruhi kehidupan setelah merdeka agar keinginan untuk menerapkan ideologi yang dianut bisa dipaksakan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki pandangan berbeda. Oleh sebab itu, pendidikan politik diterapkan agar masyarakat terhindar dari berbagai tantangan yang mungkin muncul dan siap menghadapi berbagai perbedaan pandangan.

## 2) Pendidikan Politik Masa Orde Baru

Dalam menghadapi masalah yang muncul akibat tindakan dan keputusan yang disebabkan oleh "kesalahan dan penyimpangan yang telah terjadi," pendidikan politik yang "dijalankan pada masa Orde Baru bertujuan untuk mengatur setiap aspek kehidupan dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Perubahan dalam dunia politik pada masa Orde Baru dilakukan dengan mengacu pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai landasan untuk menjalankan berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, serta dalam struktur dan proses politik. Langkah pertama yang diambil adalah menghentikan kegiatan partai komunis karena dilarang beroperasi di Indonesia, baik dari segi ajaran maupun ideologinya. Kemudian, diadakan pemilihan umum sebagai wujud pelaksanaan demokrasi yang diakui di Indonesia. Akhirnya, memberikan peluang kepada partai-partai politik yang memiliki dukungan kecil untuk bergabung dengan tujuan mengurangi jumlah partai politik. Selanjutnya, untuk menciptakan tatanan hukum yang baik, penting untuk menegakkan keadilan dengan mengikuti undang-undang yang mendasar. Kebijakan negara dijelaskan melalui rapat dengan anggota dewan, sehingga pelaksanaan undang-undang ini dapat mengikat setiap warga negara Indonesia.

Penyelenggaraan pendidikan politik "di era orde baru dilakukan melalui pelatihan untuk memahami dan mengamalkan Pancasila." Setiap warga negara diwajibkan untuk ambil bagian dalam serangkaian kegiatan ini demi membentuk karakter yang aktif, positif, dan kreatif dalam berkontribusi membangun bangsa dengan kesadaran "serta berpartisipasi dalam politik. Metode yang digunakan selama" pemerintahan Presiden Soeharto untuk menciptakan masyarakat yang bertanggung jawab terhadap Pancasila sangat relevan, karena dengan mengikuti pelatihan ini, warga negara dapat mengendalikan diri saat menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan bernegara. Pedoman dalam memahami dan mengamalkan Pancasila ini dikenal sebagai "Eka Prasetya Panca Karsa, yaitu satu komitmen untuk melaksanakan lima sila yang terdapat dalam

Pancasila.” Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh pemerintah “di era orde baru, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bernegara. Ideologi Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi partai politik” dan organisasi masyarakat lainnya dalam anggaran dasar mereka. Pedoman ini harus diikuti agar tidak ada penyimpangan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam negara akibat perbedaan fanatisme ideologis. Sebagai pedoman untuk melaksanakan kehidupan dasar, materi Pancasila diajarkan kepada semua “peserta didik mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pada mulanya, pendidikan Pancasila dikenal sebagai “Pendidikan Moral Pancasila atau PMP”, kemudian diubah menjadi” “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn”, yang memuat materi mengenai penjelasan sila-sila Pancasila yang tercantum dalam butir-butir yang ada dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

Secara keseluruhan, maksud dari pendidikan yang dilaksanakan di era Orde Baru adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang memiliki semangat Pancasila, dengan bantuan nilai-nilai agama. Melalui cara ini, dalam menjalani kehidupan berbangsa, masyarakat dapat meningkatkan sikap toleransi, mengingat Indonesia terdiri dari beragam suku, budaya, agama, dan ras. Pendidikan ini juga menawarkan kenyamanan dan keseimbangan antara hidup di dunia serta persiapan untuk kehidupan setelah mati. Masyarakat Indonesia dilatih dengan menjadikan pancasila sebagai pedoman dalam cara memandang hidup berbangsa. Untuk mencapai sasaran tersebut, “pendidikan politik dihadirkan supaya harapan masyarakat yang adil dan sejahtera dapat diwujudkan oleh seluruh” anggota komunitas. Di era Orde Baru, pemerintah membuat rencana pembangunan nasional dengan tujuan untuk merealisasikan impian bangsa Indonesia dengan membimbing masyarakat melalui “program pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek”. Karena kesuksesan dari program pemerintah ini bergantung pada partisipasi masyarakat Indonesia dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila yang tercantum dalam UUD 1945,

dengan adanya dukungan dari pemerintah yang mengatur pemerintahan. Aspirasi masyarakat Indonesia ini bisa dicapai melalui strategi dan rencana pemerintah dalam melaksanakan pendidikan politik untuk warga.

Kegagalan “yang terjadi dalam penerapan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila” dalam membentuk masyarakat Indonesia yang Pancasila-lis disebabkan oleh beberapa hal berikut:

- a) Ketidakmampuan pemimpin untuk menjadi teladan bagi masyarakat Indonesia menyebabkan timbulnya krisis panutan dalam masyarakat, karena masyarakat cenderung mengikuti perilaku dan sikap pemimpin mereka.
- b) Terbatasnya kebebasan masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan pendapat saat mendapatkan pelatihan mengenai penghayatan dan pengamalan Pancasila, dikarenakan materi yang disampaikan sering kali mencerminkan sikap dan perilaku pemimpin mereka.
- c) Pada era Orde Baru, masyarakat kurang memiliki kepercayaan pada pemerintah akibat banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan, serta menganggap bahwa pemerintah sendiri gagal dalam menerapkan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila kepada aparaturnya.

### 3) Pendidikan Politik Masa Reformasi

Keterpurukan bangsa Indonesia terjadi pada tahun 1997 akibat krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara di Asia, tetapi di Indonesia krisis tersebut lebih parah dibandingkan negara lainnya. Menurut Brata, 2006, hlm. 8 (dalam Sumanto & Haryanti, 2021, hlm. 82), ia menyatakan bahwa: “Krisis yang menimpa Indonesia di pertengahan tahun 1997 telah menghancurkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Nilai tukar Dollar terhadap rupiah terus merosot hingga mencapai Rp 16.000,- per dollar Amerika. Di tengah keputusasaan, Soeharto, yang merupakan tokoh Orde Baru, meminta bantuan IMF untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang semakin terpuruk akibat krisis moneter. Alih-alih memperbaiki keadaan, bantuan IMF tersebut tidak

mengeluarkan Indonesia dari krisis, tetapi malah membawa Indonesia ke dalam krisis yang lebih rumit, tidak hanya di bidang moneter, tetapi juga meluas ke masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan.” Keterpurukan ini disebabkan oleh berbagai faktor, sehingga puncaknya adalah munculnya gerakan reformasi di Indonesia. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah meningkat di mana-mana, terlihat dari dampak krisis di Indonesia yang menjadikan banyak industri besar bangkrut karena nilai rupiah yang jatuh, meningkatnya angka pengangguran, serta ketidakstabilan keamanan negara akibat meningkatnya kekerasan. Melihat situasi dan keamanan yang kacau, muncul ide dari mahasiswa untuk menuntut presiden Soeharto agar segera mengundurkan diri karena dianggap gagal dalam memimpin pemerintahan. Di Jakarta, mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran dengan menduduki gedung DPR-MPR. Demonstrasi besar-besaran yang terjadi di seluruh Indonesia meminta agar presiden segera menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden, yaitu BJ Habibie. Namun, jabatan presiden yang dipercayakan kepada BJ Habibie tidak bertahan lama, karena pertanggung jawabannya ditolak dalam sidang istimewa yang berlangsung pada tahun 1998.

Dari penolakan tanggung jawab Habibie, pada tahun 1999 Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengadakan sidang umum untuk memilih pemimpin baru, dan Abdurahman Wahid terpilih sebagai presiden yang menggantikan Habibie, dengan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Kepemimpinan Abdurahman Wahid juga tidak berlangsung lama, karena ia mengeluarkan dekrit presiden yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga setelah dekrit tersebut ditolak, Presiden Abdurahman Wahid harus digantikan oleh Megawati Soekarnoputri sebagai presiden Indonesia untuk melanjutkan kepemimpinan hingga tahun 2004. Masa reformasi pelaksanaan demokrasi berjalan sesuai harapan masyarakat. Seiring waktu, kepemimpinan Abdurahman Wahid mulai mengurangi sekularisasi istana. Masa kepemimpinan Habibie dan Abdurahman Wahid telah menunjukkan kemajuan demokrasi yang signifikan, lalu dilanjutkan oleh

Megawati dengan mengesahkan undang-undang pemilu. Pengesahan undang-undang pemilu ini menandai awal pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia secara langsung yang dilaksanakan oleh rakyat yang memiliki hak suara. Maka pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2004 menjadi momen bersejarah bagi Indonesia dalam pelaksanaan pemilihan umum secara langsung setelah sekian lama pelaksanaan pemilihan umum ini dilakukan secara tidak langsung. Sejarah ini mencatat bahwa kedaulatan telah dikembalikan kepada rakyat setelah sekian lama hilang.

Pemilihan umum 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, menjadikannya presiden Indonesia, menggantikan Megawati Sukarnoputri sebagai presiden keenam. Cara pemilihan umum presiden tahun 2004 digunakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan berlangsung dengan aman serta damai. Selama masa pemilihan ini, tidak ada konflik besar yang terjadi, dan bisa dikatakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum 2004 merupakan indikasi keberhasilan pemerintah dalam memberikan pendidikan politik yang diperlukan. Partisipasi dan kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden menjadi tanda sukses dari penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan merupakan pencapaian bagi rakyat Indonesia, bukan hanya untuk partai yang mendukungnya. Peluang kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono sudah terlihat setelah partainya sukses menempatkan politisi di posisi legislatif, dengan menggeser beberapa politisi dari partai Demokrasi Indonesia ke posisi kedua. Di masa kepemimpinan pertamanya, Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan kepercayaan yang besar dari masyarakat, sehingga beliau mencalonkan diri lagi untuk periode kedua melawan Megawati Sukarnoputri dan sekali lagi mendapatkan kepercayaan untuk memimpin bangsa Indonesia untuk periode kedua, yang berlangsung dari 2009 hingga 2014. Kesadaran masyarakat dalam mengikuti proses pemilihan umum presiden secara langsung mencerminkan pelaksanaan pemilihan umum di masa mendatang.

Di berbagai wilayah, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung juga dilakukan seperti pemilihan presiden. Ini dilakukan sesuai dengan mandat dalam “Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.” Pemilihan walikota, bupati, dan gubernur dilakukan secara langsung dengan melibatkan masyarakat untuk memberikan suara mereka sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang telah dipulihkan. Kebebasan membentuk partai politik setelah reformasi menunjukkan bahwa masyarakat diberikan hak untuk berorganisasi, tetapi dalam menerapkan ideologinya harus berlandaskan Pancasila.

Pada masa reformasi, sifat pragmatis partai-partai politik dalam menjalankan program-programnya berbeda dengan pendekatan yang digunakan pada zaman orde baru. Untuk memperoleh dukungan dari masyarakat, para elit partai politik secara langsung berkomunikasi dengan rakyat untuk memperkenalkan program-program mereka dan juga mendengarkan aspirasi masyarakat terkait keluhan yang ada. Para calon pemimpin juga melakukan hal serupa; baik calon presiden maupun calon kepala daerah, mereka juga memperkenalkan program-program mereka melalui program televisi yang disusun khusus sebagai metode untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah pun dapat mengerti program dan janji politik yang ditawarkan oleh calon pemimpin tersebut. Pendekatan dan strategi ini diterapkan agar masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan. Di sisi lain, pada zaman orde baru, kegiatan semacam ini tidak terjadi; masyarakat hanya mengetahui bahwa presiden atau kepala daerah telah terpilih tanpa memahami prosesnya atau siapa yang menjadi calon.

Pembentukan pendidikan politik pasca-reformasi masih kabur, karena konten yang diajarkan tidak berorientasi pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam politik, sehingga generasi muda hanya memperoleh materi yang sudah tersedia, sementara perkembangan politik

di masyarakat semakin rumit. Pemahaman masyarakat, terutama di kalangan muda tentang pendidikan politik, hanya sebatas pada materi yang didapat dari pembelajaran kewarganegaraan dari tingkat dasar hingga universitas. Di era Orde Baru, nilai-nilai kehidupan bernegara seolah terlupakan karena berbagai kepentingan pihak penyelenggara negara. Sebenarnya, pendidikan Pancasila dirancang agar pembentukan karakter pemuda berlandaskan pada pemahaman nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga usaha para pendiri bangsa untuk menanamkan karakter Pancasila kepada generasi muda terasa diabaikan. Selama masa reformasi, ideologi negara tidak mendapatkan perhatian yang cukup; lebih banyak fokus pada kemenangan partai politik untuk meraih kekuasaan, sehingga masyarakat lebih akrab dengan ideologi partai dibandingkan ideologi negara. Penekanan diberikan pada pengembangan ekonomi yang kokoh daripada penciptaan karakter Pancasila di kalangan generasi muda, yang berdampak pada krisis moral dan sosial akibat minimnya pemahaman tentang nilai-nilai dan karakter Pancasila di kalangan pemuda. Pada masa Orde Lama, materi tersebut diajarkan dalam dua pelajaran terpisah, yakni pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Namun, setelah reformasi, kedua pelajaran tersebut digabungkan menjadi satu pelajaran, yaitu pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang membatasi materi yang bisa dikuasai oleh generasi muda karena waktu yang terbatas.

### **2.3.6 Metode dan Media Pendidikan Politik**

#### **1) Metode Pendidikan Politik**

Pendidikan politik merupakan elemen penting dalam memperkenalkan politik kepada masyarakat, sehingga mereka bisa lebih memahami struktur sistem politik. Dengan adanya pendidikan politik, keberlanjutan sikap dan orientasi dalam menjalani kehidupan politik dapat dipastikan. Dalam buku yang ditulis oleh Suwarna Al Muchtar, (2000, hlm. 39), David Easton dan Jack Dennis menyatakan bahwa: “pendidikan politik termasuk dalam sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mendalami tentang sistem politik di

negaranya. Itu berarti bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik di antara anggotanya. Lewat sosialisasi politik ini, anggota masyarakat menemukan sikap dan orientasi terhadap politik yang ada di dalam masyarakat”. Selain itu, Fred I. Greenstain (Suwarma Al Muchtar, 2000, hlm. 39) menyatakan bahwa: “politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dilakukan secara terencana dan dengan kesadaran, baik secara formal maupun informal, dengan tujuan mengajarkan setiap individu agar sikap dan tindakan mereka sesuai dengan norma sosial yang ada. Dalam konteks ini, terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya membahas sikap dan perilaku individu, tetapi juga berupaya mengaitkan sikap dan perilaku individu dengan stabilitas dan keberlangsungan sistem politik”.

Penyampaian materi terkait pendidikan politik kepada masyarakat berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan pengertian mengenai sistem dan struktur politik suatu negara. Sistem dan struktur politik ini sering kali digunakan untuk memperkuat legitimasi agar implementasi struktur dan sistem tersebut bisa terus berlangsung di dalam komunitas. Namun, di sisi lain, peranan pendidikan politik juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mengalihkan sistem dan struktur politik menuju kondisi yang lebih adil dan demokratis ketika dianggap sudah tidak relevan di suatu negara. Keberhasilan transformasi ini dapat diukur dari metode penyampaian yang dilakukan melalui pendekatan, teknik, dan media yang sesuai dengan kebutuhan saat pendidikan politik disampaikan kepada masyarakat. Pendidikan politik yang disampaikan melalui jalur non formal dianggap lebih efektif dibandingkan dengan penyampaian formal. Teknik yang digunakan dalam pendidikan non formal biasanya berlangsung dengan cara yang tidak terstruktur dan bersifat fleksibel. Hal ini berbeda dengan penyampaian formal yang dilakukan oleh lembaga pemerintah, karena lebih terencana dan sistematis “dengan tiga level yaitu primer, sekunder, dan tersier, di mana kegiatan ini melibatkan pemerintah sebagai pengelola utama.” Aktivitas penyampaian pendidikan politik secara non formal akan melibatkan berbagai kelompok dari beragam

lapisan masyarakat, baik dewasa maupun anak-anak. Proses panjang dalam menjalankan pendidikan non formal ini dipelajari secara langsung melalui pengalaman, penguatan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok ini umumnya memperoleh pemahaman melalui berbagai media seperti televisi, interaksi harian, surat kabar, platform daring, atau keterlibatan langsung dalam kegiatan organisasi, atau pemilihan ketua di lingkungan mereka. Sumber informasi mengenai pendidikan politik ini memungkinkan kelompok ini memahami rincian sistem dan struktur politik di negara mereka.

Karena fokus pada prosedur dan kebebasan pribadi, model pendidikan politik (formal) dilaksanakan dengan memberi kesempatan yang cukup bagi warga untuk mengungkapkan pendapat dan ide-ide mereka. Dalam penyajian pendidikan politik, teknik yang digunakan bisa berupa:

a) Pertukaran ide

Ide umumnya muncul dari individu yang mempunyai minat dan ketertarikan pada bidang politik, kemudian dilanjutkan dengan perbincangan untuk mengeksplorasi ide-ide tersebut.

b) Grup diskusi

Perbincangan jenis ini biasanya timbul dari peserta yang berada di samping kiri dan kanan, yang kemudian saling bertukar pendapat secara singkat.

c) Analisis kasus

Masalah politik yang pernah terjadi di masa lalu menjadi topik yang menarik bagi peserta untuk dibahas dan diupayakan mencari solusi agar insiden serupa tidak terulangi.

d) Pertentangan pendapat

Pertentangan pendapat dilakukan oleh sejumlah peserta yang secara langsung berpartisipasi dalam forum tersebut dengan peran yang berbeda-beda dalam merespons isu yang ada dengan argumen yang bervariasi.

e) Aspirasi

Dalam konteks ini, peserta mengungkapkan harapan yang dimilikinya untuk mewakili grup mereka.

f) Diskursus

Seluruh peserta yang memiliki kepentingan dalam aspek politik dapat mendiskusikan isu-isu mereka secara terbuka tanpa adanya gangguan dari peserta lainnya.

g) Kaderisasi

Kaderisasi dalam pendidikan politik merupakan pendekatan atau strategi yang diterapkan untuk membentuk dan mengembangkan individu sehingga mereka memiliki kemampuan, wawasan, dan kesadaran politik yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam arena politik, baik di dalam organisasi politik, lembaga pemerintahan, atau dalam masyarakat umum. Pembinaan bertujuan untuk menghasilkan pemimpin, aktivis, atau anggota yang memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi dan sasaran organisasi.

Dalam melaksanakan pendidikan politik, sangat krusial untuk mengacu pada karakter yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, karena pada dasarnya, pendidikan politik ini dilaksanakan secara terencana untuk memperkuat kesadaran publik dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pendidikan politik ini terjadi secara tidak langsung karena didasarkan pada fondasi kehidupan bernegara yang merupakan bagian penting dari pembangunan negara secara keseluruhan. Landasan pendidikan politik bagi generasi muda tercantum dalam inpres No. 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Untuk Generasi Muda (1982, hlm. 13), yaitu: a) landasan ideologi, yakni Pancasila, b) landasan konstitusi, yaitu UUD 1945, c) landasan operasional, yaitu GBHN, d) landasan historis, yaitu Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan Proklamasi 17 Agustus 1945. Landasan-landasan tersebut adalah fondasi utama dari pendidikan politik yang disertai dengan relevansi sejarah. Aspek ini sangat vital karena warga negara, khususnya para pelajar, perlu

memahami sejarah perjuangan bangsa untuk memiliki semangat, jiwa, serta nilai-nilai perjuangan yang muncul tahun 1945.

## 2) Media Pendidikan Politik

Dalam mengomunikasikan instruksi-instruksi politik kepada publik, pemerintah memanfaatkan media sebagai instrumen yang efisien dan efektif, sebab dengan memanfaatkan media, fungsinya sebagai alat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam membujuk dan mendidik dapat berjalan dengan optimal. Informasi yang disampaikan melalui media umumnya selalu terbuka untuk menyelidiki isu-isu yang berhubungan dengan politik, selain itu metode penyampaian berita biasanya juga selalu terkini dan lebih bervariasi. Dalam era yang terus berkembang, media senantiasa menyajikan berita yang disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan dirancang sedemikian rupa "agar penerima pesan dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik."

Dalam penyampaian pendidikan politik, media yang dapat dimanfaatkan terbagi dalam "dua jenis, yaitu media langsung dan media tidak langsung. Pertama, model media langsung melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses penyampaian pendidikan politik. Proses ini dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan seperti diskusi, pelatihan, lokakarya, dan debat mengenai pendidikan politik. Keberhasilan penyampaian dengan metode ini cenderung lebih tinggi dibandingkan metode tidak langsung, karena melibatkan kelompok masyarakat yang lebih kecil dan terfokus, sehingga sasaran dan tujuan dari pengajaran materi pendidikan politik dapat tercapai dengan lebih efektif. Namun, kelemahan dari pendekatan ini adalah jangkauan dan target masyarakat yang bisa dijangkau tidak maksimal, sehingga pemahaman tentang pendidikan politik tidak merata.

Kedua, model media tidak langsung. Dalam konteks ini, penyampaian pendidikan politik kepada masyarakat biasanya dilakukan secara massal,

yaitu dengan menyebarkan informasi kepada publik melalui berbagai sarana atau media seperti spanduk, pamflet, koran, leaflet, iklan, internet, poster, brosur, dan platform online. Penggunaan media ini seringkali bersifat terbatas, yang hanya mencakup himbauan, ajakan, informasi, peringatan, atau sekadar meningkatkan kesadaran masyarakat.

Informasi yang disampaikan oleh media sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, karena publik juga memiliki kebutuhan untuk mendapatkan berita terkini yang berkaitan dengan situasi politik saat ini. Media berperan dalam menjembatani masyarakat dengan lingkungan di luar mereka, dimana informasi yang disuguhkan dapat memperluas pemahaman mereka tentang politik, sehingga secara tidak langsung memperkaya wawasan dalam bidang pendidikan politik. Di samping itu, media juga berfungsi dalam meningkatkan pemahaman, mengubah perilaku, serta membentuk pandangan dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Lebih lanjut, masyarakat selalu memiliki rasa ingin tahu tentang peristiwa yang berlangsung di sekeliling mereka, namun mereka tidak dapat memenuhi rasa ingin tahunya tanpa bantuan dari pihak lain. Pengaruh media juga dimanfaatkan oleh pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu dalam suatu pemerintahan untuk memandu pendapat publik. Dalam konteks politik, media saat ini juga digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi dan pesan dengan cara yang sangat efisien dan efektif.

Lembaga resmi pun dapat melaksanakan kegiatan nonformal melalui program pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penyuluhan serta sosialisasi bagi pemilih pemula di tingkat sekolah menengah atas dan di komunitas yang menunjukkan partisipasi politik yang rendah. Bentuk media yang digunakan untuk memberikan pendidikan politik seharusnya mencerminkan keadaan nyata, begitu juga dengan simulasi yang dilaksanakan. Tujuan dari ini adalah agar saat pelaksanaan yang sesungguhnya, mereka dapat beradaptasi dengan efektif. Dengan adanya pendidikan politik bagi masyarakat, jumlah pemilih yang tidak berpartisipasi juga akan menurun, sekaligus meningkatkan keterlibatan

politik sehingga mereka menyadari bahwa pembangunan dalam lima tahun mendatang akan dipengaruhi oleh suara mereka dalam memilih pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mempersiapkan mereka sebagai generasi yang akan mengambil alih kepemimpinan di masa depan.

## **2.4 Kaderisasi**

### **2.4.1 Pengertian Kaderisasi**

Kaderisasi dipahami sebagai suatu proses yang berlangsung terus-menerus untuk membekali orang-orang yang berpotensi menjalani posisi serta tanggung jawab kepemimpinan di masa akan datang. Proses ini mencakup penyampaian nilai-nilai dari organisasi, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dengan cara yang teratur dan terencana, dengan harapan untuk menjamin kesinambungan dan mutu kepemimpinan dalam organisasi, Effendi, A. (2022). Sedangkan Dr. Ir. M. Zilal Hamzah (2020) Berpendapat bahwa Kaderisasi tidak hanya terfokus pada kepemimpinan yang resmi, tetapi juga meliputi peningkatan kemampuan individu untuk menjadi penggerak perubahan dan inovasi di dalam organisasi. Tahapan ini mencakup pemberian pengetahuan teknis, keterampilan manajerial, dan pemahaman yang mendalam tentang visi serta misi organisasi, agar kader dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam mencapai sasaran organisasi

Pendapat lain mengatakan bahwa dalam pengertian organisasi sosial dan pemuda, proses kaderisasi sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai idealisme, semangat untuk melayani, dan rasa tanggung jawab sosial. Proses ini mencakup pembentukan karakter, peningkatan kesadaran tentang masalah-masalah sosial, dan pelatihan keterampilan dalam organisasi serta kepemimpinan, dengan tujuan untuk menghasilkan generasi yang memiliki integritas dan dedikasi untuk kemajuan masyarakat, Machfuz, I. (2024).

Dan dalam lingkungan organisasi, kaderisasi adalah investasi penting pada tenaga kerja. Ini lebih dari sekadar pelatihan, kaderisasi mencakup pendekatan menyeluruh yang meliputi pencarian bakat terbaik, peningkatan kemampuan melalui belajar dan pengalaman, serta pembentukan karakter dan

integritas yang sejalan dengan nilai-nilai organisasi. Sasaran utamanya adalah melahirkan pemimpin masa depan yang terampil dan berkomitmen, Ma'ruf, S. N. A. (2021). Kaderisasi di zaman digital perlu menyesuaikan cara dan pendekatannya. Selain berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan cara lama, kaderisasi juga perlu menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang terus menerus, menciptakan koneksi, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Tujuannya tetap serupa, yaitu menciptakan pemimpin dan anggota organisasi yang memiliki relevansi dan daya saing, Indistuti, R. (2023).

#### **2.4.2 Indikator Kaderisasi**

Prof. Dr. H. Asep Effendi, M.Si. (2022) dalam Bukunya yang Berjudul *Kepemimpinan Transformasional dalam Organisasi Modern* mengemukakan bahwa indikator Kaderisasi ada empat diantaranya yaitu:

- 1) **Tingkat Partisipasi dalam Program Pengembangan:** Persentase orang-orang yang memiliki potensi dan secara aktif terlibat dalam berbagai pelatihan, bimbingan, dan program pengembangan kepemimpinan yang diadakan oleh organisasi.
- 2) **Progres Kompetensi Kepemimpinan:** Peningkatan nilai atau tingkat kemampuan kepemimpinan (seperti keterampilan strategis, komunikasi, pengambilan keputusan) para kader dari waktu ke waktu melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala.
- 3) **Tingkat Retensi Kader Potensial:** Persentase kader yang tetap aktif dan memberikan kontribusi dalam organisasi setelah mereka mengikuti program kaderisasi.
- 4) **Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan:** Tingkat keikutsertaan kader dalam diskusi, perencanaan strategis, atau kelompok kerja yang berhubungan dengan pengembangan organisasi.

Sedangkan Dr. Siti Nur Azizah Ma'ruf, M.Si. (2021) Berpendapat bahwa Indikator Kaderisasi itu diantaranya:

- 1) Identifikasi Bakat dan Potensi: Efektivitas sistem untuk menemukan individu yang memiliki kemampuan kepemimpinan tinggi dalam suatu organisasi.
- 2) Kesesuaian Penempatan dengan Kompetensi: Tingkat kecocokan antara tugas atau peran yang dipegang oleh kader dengan kemampuan yang telah dibangun lewat program pelatihan kader.
- 3) Pembentukan Karakter dan Integritas: Penilaian terhadap seberapa baik kader menginternalisasi nilai-nilai organisasi dan etika melalui pengamatan perilaku dan umpan balik.
- 4) Keberhasilan Regenerasi Kepemimpinan: Tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mengisi posisi penting dengan kader yang berasal dari dalam yang telah dipersiapkan.

Dr. H. Imam Machfuz, M.Pd. (2024) mengemukakan indikator Kaderisasi di Organisasi Kemasyarakatan/ Kepemudaan ialah:

- 1) Internalisasi Nilai-Nilai Ideal dan Pengabdian: Seberapa baik kader memahami dan menerapkan nilai-nilai organisasi serta semangat untuk melayani masyarakat.
- 2) Kesadaran dan Keterlibatan dalam Isu Sosial: Tingkat perhatian dan pelibatan aktif kader dalam menangani masalah sosial yang penting.
- 3) Keterampilan Organisasi dan Kepemimpinan Praktis: Kemampuan kader dalam mengatur kegiatan organisasi, memimpin kelompok, dan mengambil langkah-langkah awal.
- 4) Tingkat Keberlanjutan Kepemimpinan Organisasi: Keberhasilan organisasi dalam menciptakan pemimpin baru yang memiliki etika dan komitmen terhadap masyarakat.

Dan Dr. Rina Indiasuti, S.E., M.SIE. (2023) menyampaikan Indikator Kaderisasi dalam perspektif era digital ialah:

- 1) Tingkat Keterlibatan dalam Platform Pembelajaran Digital: Seberapa sering dan seberapa baik kader berpartisipasi dalam platform e-learning, webinar, atau forum diskusi online yang disediakan oleh organisasi.

- 2) Pengembangan Kompetensi Digital: Peningkatan keterampilan kader dalam menggunakan alat dan teknologi digital yang berkaitan dengan tugas dan kepemimpinan.
- 3) Kualitas Jaringan Digital: Luas serta tingkat baiknya jaringan profesional yang dibangun oleh kader melalui platform digital.
- 4) Adaptabilitas terhadap Perubahan Teknologi: Kemampuan kader untuk merespon dan mengadopsi teknologi baru yang membantu efektivitas organisasi.

Adapun Secara Spesifik mengenai Indikator Kaderisasi dalam Partai Politik itu sendiri salah satunya di kemukakan oleh Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid, M.A. (2023) dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi dan Partai Politik di Indonesia Era Reformasi*, Diantaranya:

- 1) Tingkat Partisipasi Aktif dalam Pendidikan Politik: Persentase anggota partai yang terlibat aktif dalam program belajar dan pelatihan politik yang diadakan oleh partai secara bertahap.
- 2) Progres Pemahaman Ideologi dan Platform Partai: Meningkatnya pemahaman anggota tentang ideologi, visi, misi, dan platform partai melalui penilaian pengetahuan secara rutin.
- 3) Keterlibatan dalam Struktur dan Fungsi Partai: Tingkat partisipasi anggota dalam berbagai lapisan struktur partai (ranting, cabang, daerah, pusat) dan keterlibatan dalam tugas-tugas partai (kampanye, sosialisasi, perekrutan anggota).
- 4) Representasi Kader dalam Jabatan Publik: Jumlah anggota partai yang sukses menduduki posisi publik (legislatif, eksekutif) di berbagai tingkat sebagai hasil dari proses pembinaan anggota yang baik.

Dan juga Dr. Ikrar Nusa Bhakti, M.Si. (2021) Berpendapat mengenai Indikator Kaderisasi Partai Politik ialah:

- 1) Kualitas Rekrutmen Anggota Potensial: Kemampuan partai dalam mencari dan mengambil orang-orang yang memiliki bakat kepemimpinan dan dedikasi terhadap prinsip-prinsip partai.

- 2) Pengembangan Kapasitas Organisasi: Seberapa baik kemampuan organisasi partai berkembang di berbagai level berkat kader-kader yang terlatih dan mahir.
- 3) Pembentukan Etika dan Integritas Politik: Evaluasi terhadap perilaku dan sejarah kader dalam menjaga etika dan kejujuran dalam politik.
- 4) Solidaritas dan Kohesi Internal Partai: Tingkat persatuan dan kerja sama di antara kader sebagai hasil dari proses pelatihan yang berhasil menciptakan identitas dan kesetiaan partai.

#### **2.4.3 Hubungan Indikator Kaderisasi Partai Politik dengan Pendidikan Politik**

Para pakar setuju bahwa pendidikan politik adalah dasar penting dan bagian utama dalam proses pembentukan anggota partai politik. Keberhasilan dalam membentuk anggota partai politik sangat dipengaruhi dan dinilai melalui seberapa efektif dan baiknya program pendidikan politik yang terencana dan berkelanjutan dilaksanakan. Berikut ialah beberapa Pendapat Pakar Ahli mengenai Hubungan Indikator Kaderisasi Partai Politik dengan Pendidikan Politik.

Rasyid, M. R. (2023) menyatakan bahwa sejauh mana seseorang terlibat secara aktif dalam pendidikan politik merupakan tanda penting yang dapat dijadikan acuan untuk menilai keberhasilan dalam Kaderisasi. Pendidikan politik yang baik akan membantu kader memahami nilai-nilai dan tujuan partai dengan lebih baik. Kader yang mendapatkan pendidikan yang baik akan lebih bersemangat dan mampu berkontribusi secara aktif dalam organisasi partai, serta lebih siap untuk mengisi posisi publik. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik secara langsung membantu meningkatkan kualitas indikator-indikator dalam Kaderisasi.

Sedangkan Pendidikan politik yang menyeluruh membantu meningkatkan kualitas dalam merekrut anggota baru karena partai dapat menarik orang-orang yang memiliki pengetahuan politik dan kesadaran ideologis yang lebih baik. Pendidikan politik juga sangat penting untuk mengembangkan kemampuan organisasi dengan meningkatkan pengetahuan

dan keterampilan para kader. Selain itu, pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai dan etika akan membantu membentuk moral dan integritas para kader, serta memperkuat solidaritas dan kesatuan di dalam partai melalui pemahaman yang sama tentang tujuan dan nilai-nilai partai, Bhakti, I. N. (2021).

Rizkiyansyah (2020) memandang bahwa pendidikan politik adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan pemimpin baru yang berkelanjutan. Orang-orang yang mendapatkan pendidikan politik akan lebih siap untuk menjalankan tugas kepemimpinan di masa yang akan datang. Pendidikan politik yang berkualitas juga akan membuat mereka lebih peka terhadap apa yang diinginkan masyarakat karena mereka diajarkan untuk memahami dan memperjuangkan kepentingan orang banyak. Selain itu, pendidikan politik dapat mendorong munculnya ide-ide baru dalam program dan kebijakan partai melalui orang-orang yang memiliki wawasan luas dan berpikir kritis, sehingga hal ini bisa meningkatkan citra dan daya tarik partai di mata publik.

Dan dapat disimpulkan dari sudut pandang para pakar, pendidikan politik dan indikator kaderisasi partai politik sangat berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain. Pendidikan politik yang direncanakan dengan baik, terstruktur, dan berkualitas tinggi adalah syarat utama untuk mencapai hasil kaderisasi yang baik. Tanpa pendidikan politik yang baik, sulit bagi partai politik untuk menghasilkan kader yang memiliki kemampuan, integritas, responsif, dan bisa membawa partai mencapai tujuannya. Sebaliknya, indikator kaderisasi bisa menjadi ukuran seberapa efektif program pendidikan politik yang dilakukan oleh partai. Oleh karena itu, partai politik harus melihat pendidikan politik sebagai investasi yang penting dan jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di partai dan keberlangsungan organisasi.

## **2.5 Partai Politik**

### **2.5.1 Pengertian Partai Politik**

Para pakar mendefinisikan partai politik sebagai komponen dalam masyarakat yang tidak terstruktur, terdiri dari berbagai elemen. Maurice

Duverger mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekumpulan individu yang memiliki kesamaan dalam pandangan, ideologi, dan tujuan yang berkaitan dengan sudut pandang politik suatu negara. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa partai politik berfungsi sebagai organisasi sosial yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek politik. Miriam Budiharjo menekankan pentingnya partai politik dalam masyarakat yang terorganisir dengan baik, di mana para anggotanya berusaha untuk memperoleh kekuasaan dalam pemerintahan. Menurut Robert Carr, partai politik merupakan sebuah asosiasi individu yang berupaya untuk mencapai dan mengawasi pemerintah yang sah dengan visi dan tujuan akhir yang sejalan. Partai politik merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan untuk meraih kekuasaan dan memberikan sumbangsih kepada pemerintahan di negara-negara seperti Indonesia. Setiap partai memiliki mekanisme internal serta struktur yang memiliki fungsi dan kekuasaan yang berbeda-beda dalam pengaturan partai (Sahib, A. 2023, hlm. 43-44).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menjelaskan: "Partai Politik adalah suatu kelompok yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok rakyat Indonesia secara sukarela dengan tujuan dan harapan yang sama untuk memperjuangkan serta melindungi kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Partai politik berfungsi sebagai salah satu pendorong kunci dalam tercapainya kesuksesan suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Dengan adanya kolaborasi antara partai politik dan masyarakat, partai politik dapat menjalankan perannya secara efektif. Oleh karena itu, partai politik berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai politik bertindak sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi mereka dalam proses pembangunan negara yang adil dan makmur. Dalam beberapa dekade terakhir, sistem politik

di Indonesia telah menjadikan partai politik sebagai salah satu pilar utama yang mendukung demokrasi. Keberadaannya dalam masyarakat menjadi salah satu konsekuensi yang memberikan kekuatan politik kepada masyarakat melalui berbagai fungsi yang dilakukannya (Wijaya Kusuma dan Kawan-Kawan, 2020, hlm. 166).

Dalam tatanan demokrasi, partai politik berperan sebagai alat untuk komunikasi politik, sosialisasi politik, perekrutan kader, serta mediasi dalam konflik. Di samping itu, partai politik memiliki peranan krusial dalam menjaga kestabilan politik, menciptakan konsensus nasional, dan merealisasikan kebijakan pemerintah melalui keterlibatan dalam pemilihan umum. Ideologi yang diikuti partai biasanya menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, yang membedakannya dari kelompok politik lainnya.

Perjalanan partai politik di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa fase yang mencerminkan dinamika politik serta evolusi sistem pemerintahan. Berikut adalah penjelasan mengenai perkembangan partai politik sejak setelah kemerdekaan hingga sekarang:

Pada fase awal kemerdekaan, Indonesia mengadopsi sistem partai yang beragam. Organisasi politik muncul sebagai alat untuk memperjuangkan ideologi dan kepentingan. Beberapa partai penting yang terbentuk pada masa ini adalah:

- 1) Partai Nasional Indonesia (PNI): Berlandaskan nasionalisme.
- 2) Masyumi: Berlandaskan Islam modern.
- 3) Partai Komunis Indonesia (PKI): Berlandaskan komunisme.
- 4) Partai Nahdlatul Ulama (NU): Perwakilan Islam tradisional.
- 5) Partai Sosialis Indonesia (PSI): Berlandaskan sosialisme.

Pemilu perdana yang diadakan pada tahun 1955 mencerminkan keragaman politik, dengan PNI, Masyumi, NU, dan PKI sebagai partai-partai dominan. Namun, sistem multipartai tersebut dinilai kurang stabil, sehingga

Presiden Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 yang membatasi peran partai-partai politik.

Dalam Demokrasi Terpimpin, fungsi partai politik diminimalkan, dan kekuasaan lebih banyak terpusat pada Presiden Soekarno. Sistem ini dikuasai oleh tiga kekuatan: PNI, TNI, dan PKI. Banyak partai politik kehilangan pengaruh mereka akibat kebijakan pengendalian kekuasaan yang terpusat.

Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, partai politik disatukan melalui kebijakan penyederhanaan partai pada tahun 1973. Sistem ini menghasilkan kontrol yang ketat terhadap partai politik, yang mengakibatkan dominasi Golkar dalam pemilu selama era Orde Baru. Dari sistem ini, terbentuklah tiga partai:

- 1) Golongan Karya (Golkar): Menguasai pemerintahan.
- 2) Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Koalisi partai yang berlandaskan Islam.
- 3) Partai Demokrasi Indonesia (PDI): Perpaduan partai-partai nasionalis dan sosialis.

Setelah Soeharto lengser, sistem multipartai diperkenalkan lagi. Partai-partai baru mulai bermunculan, seperti:

- 1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P): Berdasarkan nasionalisme.
- 2) Partai Golkar: Melanjutkan eksistensinya dengan inovasi.
- 3) Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Perwakilan Islam modern.
- 4) Partai Demokrat: Didirikan pada 2001, berbasis sentris.
- 5) Dan Partai-partai lainnya.

Pemilu 1999 menjadi awal kebangkitan sistem multipartai yang terus berkembang. Saat ini, banyak partai bersaing dalam pemilu. Undang-Undang Partai Politik yang mengatur ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) juga memengaruhi jumlah partai yang dapat masuk ke parlemen.

### 2.5.2 Fungsi dan Peran Partai Politik

Partai politik di Indonesia menyadari betapa pentingnya hak untuk mengekspresikan diri dan berkumpul. Partai-partai ini memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam masyarakat, yang memengaruhi kedudukan masing-masing partai di komunitas. Keterkaitan partai politik sangat penting berkenaan dengan cara mereka diorganisir. Ahli Firmansyah mengelompokkan fungsi dan peran partai politik menjadi dua kategori, berdasarkan berbagai pandangan tentang peran mereka dalam masyarakat, sebagai berikut:

- 1) Partai politik berfungsi sebagai organisasi internal, menyediakan pembelajaran, pelatihan, dan dukungan bagi anggotanya;
- 2) Partai politik juga memiliki peranan dalam organisasi eksternal. Ini berarti bahwa partai politik selalu berhubungan dengan negara dan masyarakat. Partai politik ada untuk melaksanakan dan memberikan akuntabilitas terkait aspek moral, etika, dan konstitusional dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mencapai tujuan kolektif dalam menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik.

A. Rahman menyampaikan pandangannya mengenai fungsi dan peran partai politik, yang terdiri dari 4 (empat) jenis dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sosialisasi politik

Partai politik membentuk pandangan dan sikap terhadap fenomena politik dari usia dini hingga dewasa, memengaruhi kehidupan masyarakat dan membentuk kepercayaan politik mereka.

- 2) Partisipasi politik

Mendorong keanggotaan partai dengan mengajarkan prinsip-prinsip partai kepada anggota dalam lingkungan partai, serta mempromosikan persatuan politik.

- 3) Komunikasi politik

Partai menyaring agenda berdasarkan keinginan masyarakat, mengurangi kebingungan antara partai politik dengan menangani isu-isu bersama.

#### 4) Artikulasi kepentingan

Artikulasi melibatkan anggota DPR yang mewakili kepentingan individu dan kelompok melalui partai politik, dengan fokus pada isu-isu yang bersifat nasional dan lokal.

Fungsi dan peran partai politik sangat penting dalam sistem demokrasi, terutama di negara seperti Indonesia, berikut adalah beberapa fungsi utama partai politik:

##### 1) Rekrutmen Politik dan Pendidikan

Partai politik memiliki tugas untuk merekrut orang-orang yang akan bersaing dalam posisi politik, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Tugas ini dilakukan melalui proses pemilu yang berlangsung secara demokratis. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi

##### 2) Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Partai politik bertindak sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyampaikansuarat dan kepentingan rakyat kepada para pengambil keputusan. Partai juga mengumpulkan berbagai kepentingan yang berbeda menjadi kebijakan yang terencana dan bisa diterapkan.

##### 3) Kontrol terhadap Kekuasaan

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis, partai politik memiliki peran untuk mengawasi kinerja pemerintah. Di Indonesia, meskipun terdapat sistem presidensial, hubungan konstitusional antara partai politik di lembaga legislatif dan eksekutif memungkinkan adanya pengawasan yang saling mengontrol

##### 4) Mendukung Demokrasi yang Aspiratif

Partai politik bertugas untuk menciptakan pemilu yang aspiratif dan demokratis dengan membangun suasana kompetisi politik yang sehat dan menghasilkan pemimpin yang mampu. Namun, tantangan seperti lemahnya konsolidasi demokrasi dan munculnya calon tunggal dalam pemilu di beberapa wilayah menunjukkan bahwa peran partai politik masih perlu diperkuat

## **2.6 Partai Keadilan Sejahtera**

### **2.6.1 Sejarah Terbentuknya Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebuah partai politik di Indonesia yang berakar dari perkembangan Partai Keadilan (PK) pada 20 April 2002. Partai ini dikenal karena prinsip-prinsip Islamnya dan berkomitmen untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kerangka nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Dalam hal ideologi, PKS menekankan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan pendekatan yang moderat dan transformasi. PKS memiliki peran penting dalam dinamika politik Indonesia sebagai salah satu partai Islam modernis dengan jaringan kader yang kuat dan terorganisir.

PKS bermula dari gerakan dakwah di kampus yang berkembang pada tahun 1980-an melalui Jamaah Tarbiyah, sebuah gerakan yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini melibatkan mahasiswa di banyak universitas di Indonesia. Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Jamaah Tarbiyah bertransformasi menjadi Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998. Karena tidak berhasil memenuhi ambang batas parlemen dalam Pemilu 1999, partai ini berganti nama menjadi PKS pada tahun 2002.

Sejak saat itu, PKS dikenal sebagai partai dengan dasar ideologi Islam yang kokoh, tetapi secara perlahan mulai mengadopsi strategi politik yang lebih pragmatis, termasuk berkoalisi dengan partai-partai non-Islam. PKS menunjukkan kinerja yang signifikan dalam berbagai pemilu, walaupun menghadapi tantangan seperti masalah internal dan citra di masyarakat. Sepanjang perjalanan politiknya, PKS juga menunjukkan perubahan ideologi

dari partai Islam yang eksklusif menjadi lebih inklusif untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Asal muasal PKS bisa ditemukan dari aktivitas penyebaran ajaran agama yang muncul di sejumlah universitas di Indonesia pada dekade 1980-an. Aktivitas ini dipimpin oleh Muhammad Natsir, seorang tokoh yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia dari Partai Masyumi (yang dibubarkan pada tahun 1960) dan yang juga mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) pada tahun 1967. Organisasi ini awalnya bertujuan untuk mengakhiri aktivitas misi Kristen di Indonesia. Tugas pokok DDII adalah untuk mendirikan Lembaga Mujahid Dakwah yang terhubung dengan DDII, yang dipimpin oleh Muhammad Imaduddin Abdulrahim. Dia secara aktif mengadakan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, yang terletak di Institut Teknologi Bandung.

Pada tahun 1985, pemerintahan Orde Baru mengharuskan semua organisasi massa memakai Pancasila sebagai landasan. Keputusan ini membuat sejumlah pemimpin Islam merasa marah dan mengkritik pemerintah Soeharto yang dianggap telah memperlakukan politik Islam dengan tidak baik. Sementara itu, Jamaah Tarbiyah mulai mendapatkan dukungan di antara mahasiswa yang terlibat dalam Rohis dan para aktivis dakwah di berbagai universitas. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, yang merupakan salah satu anggota Jamaah Tarbiyah, berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan mahasiswa di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ini menjadikannya sebagai anggota Jamaah pertama yang berhasil menduduki posisi di tingkat universitas. Satu tahun setelah itu, Zulkieflimansyah, yang juga merupakan bagian dari Jamaah Tarbiyah, terpilih sebagai ketua senat mahasiswa di universitas yang sama.

Setelah itu, para anggota Jamaah Tarbiyah menciptakan organisasi dakwah di kampus, yang kemudian menjadi bagian resmi dari kegiatan mahasiswa di berbagai universitas sekuler di Indonesia, seperti Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum Studi Islam. Pada waktu itu, kata usrah yang biasa digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok kecil

pembelajaran di LDK mulai dihubungkan dengan sistem sel yang diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin untuk merekrut anggota baru. Walaupun ada banyak faksi dan kelompok dalam LDK, mereka semua setuju untuk membentuk FSLDK Indonesia pada tahun 1986. Pada tahun 1998, pertemuan tahunan FSLDK yang ke-10 di Malang digunakan untuk menyatakan lahirnya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

PK dan PKS sudah lama mempunyai hubungan dengan Ikhwanul Muslimin, sebuah grup yang berasal dari Mesir, karena beberapa orang yang mendirikan mereka pernah belajar di sekolah-sekolah Ikhwan. Salah satu contohnya adalah ketika Mardani Ali Sera, yang menjadi juru bicara PKS, mengungkapkan bahwa beberapa karya dari pendiri Ikhwan, Hasan al-Banna, digunakan sebagai sumber dan bacaan dalam proses pengkaderan partai. Selain itu, PKS juga dicurigai terlibat dalam perubahan di Mesir pada tahun 2011, meskipun klaim ini kemudian dibantah. Mereka menegaskan bahwa anggota partai yang diperkirakan sekitar 600 orang, yang sebagian besar adalah pelajar, hanya bertugas membantu mendistribusikan bantuan logistik kepada warga Indonesia yang terjebak di Mesir. Namun, PKS mengungkapkan rasa "kesedihan" mereka terkait penyingkiran presiden Mesir dari Ikhwanul Muslimin, Muhammad Mursi, yang terjadi pada Juli 2013 oleh angkatan bersenjata Mesir, seraya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk memberikan tekanan kepada militer Mesir.

Keterkaitan antara PKS dan Ikhwanul Muslimin juga didukung oleh Yusuf al-Qaradawi, seorang tokoh penting di Ikhwan, serta Yusuf Supendi, pendiri PK yang merupakan bekas anggota PKS. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar, yaitu 90% dari dana PK untuk pemilihan umum 1999, berasal dari partai-partai yang memiliki pemikiran serupa di wilayah Timur Tengah. Namun, Surahman Hidayat, yang merupakan ketua Dewan Syariah PKS, menggarisbawahi bahwa mereka hanya memiliki "hubungan visi" dengan Ikhwanul Muslimin dan menolak klaim yang mengatakan bahwa PKS merupakan versi lain dari organisasi itu. Surahman malah menegaskan bahwa PKS secara fundamental adalah penerus dari perjuangan Masyumi.

PKS juga dikatakan mirip dengan Partai Keadilan dan Pembangunan yang dipimpin oleh Abdullah Gül yang berkuasa di Turki. Surahman Hidayat juga membenarkan bahwa mereka sering bertemu dengan anggota AKP di Turki "untuk membandingkan". Hubungan ini semakin kuat melalui berbagai seminar dan kunjungan antara PKS dan AKP, seperti saat pemimpin AKP datang ke Jakarta pada Februari 2012. Pada bulan April 2013, PKS juga mengadakan pertemuan untuk anggota internasional di Istanbul. Walaupun Anis Matta selaku presiden menyatakan bahwa pemilihan Istanbul diputuskan karena letak kota yang strategis di antara benua Asia, Eropa, dan Afrika, Anis juga mengatur pertemuan dengan petinggi AKP dan mengharapkan anggotanya bisa mengambil pelajaran dari kesuksesan AKP di Turki.

PKS diakui sebagai salah satu partai yang paling vokal dalam mendukung kebebasan Palestina. Beberapa tindakan PKS untuk mencapai kebebasan Palestina dilaksanakan melalui protes, contohnya pada bulan Maret 2010 di area Monas. PKS juga sering menilai negara-negara yang tidak memberikan dukungan kepada upaya kemerdekaan Palestina, contohnya pada bulan November 2012, saat Amerika Serikat menolak untuk mengakui Palestina sebagai negara pengamat di PBB. Demo PKS dikenal karena menggerakkan banyak kader, dan sering juga mengikutsertakan orang-orang non-Muslim, seperti politikus PDI Perjuangan, Sabam Sirait, yang ikut beraksi bersama pengunjuk rasa PKS pada Maret 2010. Di samping itu, PKS memanfaatkan banyaknya anggota untuk mengumpulkan dana dengan jumlah yang besar, dan sering kali uang tersebut dikirim langsung melalui perwakilan khusus PKS ke Palestina, seperti saat pengumpulan dana yang dilakukan serentak di seluruh DPW PKS di Indonesia pada bulan November tahun 2012.

### **2.6.2 Penerapan Nilai-Nilai Islam di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Pola Kaderisasi yang diterapkannya.**

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kaderisasi politik secara sistematis dan terencana. Kaderisasi ini bertujuan untuk menciptakan kader yang dapat memahami dan menghayati nilai-nilai

Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Salah satu nilai penting yang ditekankan adalah tanggung jawab moral serta etika Islam dalam setiap keputusan politik, yang disampaikan melalui kegiatan seperti halaqah (kelompok diskusi) dan pelatihan mendalam.

*Halaqah*, yang merupakan bagian utama dari proses kaderisasi PKS, digunakan untuk mengajarkan kader mengenai ajaran Islam secara komprehensif. Aktivitas ini meliputi pembelajaran rutin dalam kelompok kecil untuk membahas berbagai elemen keislaman dan penerapannya dalam masyarakat, termasuk di ranah politik. Selain itu, kader diajarkan untuk menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan pengabdian kepada masyarakat, yang mencerminkan visi Islam sebagai rahmatan lil'alam.

PKS juga memanfaatkan kegiatan sosial seperti pengajian, kegiatan bakti sosial, dan buka bersama untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menyebarkan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, kader diajarkan untuk menjadi agen perubahan di masyarakat dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Dengan cara ini, PKS tidak hanya fokus pada penguatan kader tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan komunitas sekitar.

Dalam konteks pendidikan politik, PKS berupaya menanamkan pemahaman politik yang berlandaskan Islam kepada kadernya. Pendidikan ini mencakup pengenalan pentingnya nilai-nilai Pancasila yang sejalan dengan ajaran Islam, sehingga kader PKS dapat menjadi warga negara yang baik sambil menjalankan misi dakwah Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan kader yang tidak hanya mahir dalam politik, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi sebagai pemimpin masyarakat.

## **2.7 PKn sebagai Model Pendidikan Politik di Masyarakat**

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran yang signifikan dalam pendidikan politik di masyarakat. Sebagai disiplinnya yang berorientasi pada pembentukan karakter bangsa, PKn bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan aktif dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks pendidikan politik, PKn memberikan kesempatan untuk mempelajari prinsip-prinsip konstitusi, hak asasi manusia, dan

mekanisme politik yang memungkinkan individu untuk menjadi warga negara yang kritis dan bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata kuliah yang menekankan pengembangan tiga kemampuan warganegara, yaitu pemahaman tentang kewarganegaraan, keterampilan dalam kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan, Maiello et al., 2003 (dalam Cahyono dan Kawan-Kawan, 2023, hlm.130). Erwin (dalam Belladonna & Anggraena, 2019) menjelaskan bahwa kompetensi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi: “Pertama, Masyarakat harus mampu menunjukkan *civic knowledge*, yaitu individu yang diperkenalkan dengan pendidikan Kewarganegaraan dapat memahami informasi tentang kebangsaan dan kewarganegaraan. Kedua, pada level *civic dispositions*, di mana individu memahami rincian kebangsaan dan kewarganegaraan serta mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh pada tingkat *civic knowledge* dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pada level yang lebih praktis terdapat pada *civic skill*, di mana orang-orang di level ini telah terampil mengaplikasikannya dalam bentuk keterampilan, contohnya adalah mereka yang mampu berperan dalam pembuatan kebijakan publik yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti mereka yang terlibat dalam legislatif atau individu yang dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, seperti aktivis di lembaga swadaya masyarakat” Pribadi, 2010 (dalam Cahyono dan Kawan-Kawan, 2023, hlm.130).

### **2.7.1 Peran PKn dalam membangun Sikap Demokratis**

Salah satu fungsi penting PKn adalah untuk mengembangkan sikap demokrasi. Penelitian yang dilakukan oleh Hamisa (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran PKn yang melibatkan diskusi kelompok dan interaksi aktif antara guru dan siswa di kelas dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam organisasi dan forum diskusi. Sikap demokratis ini tercermin melalui proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk menyampaikan pendapat dan menyadari pentingnya toleransi serta kolaborasi.

### **2.7.2 Tantangan dan Strategi Implementasi PKn Sebagai Pendidikan Politik**

Tantangan dalam pelaksanaan PKn sering kali berhubungan dengan lingkungan sosial yang tidak mendukung dan rendahnya motivasi siswa. Oleh sebab itu, pendekatan seperti pembelajaran yang menarik, memberikan motivasi, dan kolaborasi antara guru dan orang tua menjadi penting untuk memastikan pembentukan karakter siswa yang demokratis.

### **2.7.3 PKn Sebagai Wahana Pendidikan Holistik**

PKn tidak hanya menekankan pada pendidikan resmi di sekolah, melainkan juga menggunakan pendekatan menyeluruh yang mencakup kehidupan sosial. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mufidah (2020), pengintegrasian pendidikan demokrasi dalam kehidupan warga negara berfungsi untuk memperkuat kesadaran politik secara lebih mendetail. Oleh karena itu, PKn bisa berperan sebagai sarana yang efektif untuk menghasilkan warga negara yang cerdas, baik dari segi intelektual maupun moral.

### **2.7.4 Kompetensi Kewarganegaraan sebagai modal dalam Penerapan Pendidikan Politik di Masyarakat**

Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) adalah aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis dan berpartisipasi. Kompetensi ini terdiri dari tiga elemen utama: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan watak kewarganegaraan (*civic dispositions*). Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman mengenai sistem pemerintahan, hukum, hak serta kewajiban warga, dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini memberikan dasar pemahaman bagi masyarakat untuk menganalisis dan menangani isu-isu politik dengan cara yang rasional dan kritis.

isi dari pengetahuan kewarganegaraan dalam pendidikan kewarganegaraan meliputi lima hal yaitu; 1) pengertian tentang kehidupan sebagai warga negara, aktivitas politik, dan sistem pemerintahan, 2) landasan dari sistem politik di Indonesia, 3) bagaimana pemerintahan yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 dapat mencapai tujuan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia? 4) bagaimana hubungan antara Indonesia dan

negara lain dalam konteks isu-isu internasional? dan 5) peran apa yang dimainkan oleh warga negara dalam proses demokrasi di Indonesia? Jamaludin dan Sofia, 2021 (dalam Cahyono dan Kawan-Kawan, 2023, hlm.130).

Keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan praktis untuk terlibat dalam proses politik dan sosial. Ini termasuk kemampuan berpikir kritis, menganalisis isu publik, membuat keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan komunitas. Sebagai contoh, warga dapat mengawasi kebijakan publik, menyampaikan pendapat, atau bahkan memimpin inisiatif yang menargetkan kepentingan masyarakat. Dalam lingkungan pendidikan, keterampilan ini bisa ditingkatkan lewat metode pembelajaran partisipatif seperti simulasi politik atau proyek komunitas. partisipasi masyarakat sangat terkait dengan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), yang merupakan kemampuan penting untuk membentuk warga negara yang baik. Somantri dalam Wahab dan Sapriya, 2011 (dalam FD Yadi, AD Normansyah, CM Khoerudin, 2024, hlm. 3) mengemukakan bahwa sifat patriotik, toleransi, religiusitas, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila adalah ciri-ciri dari warga negara yang baik. Keterampilan kewarganegaraan ini dapat dikembangkan di lingkungan sosial desa dan mencakup pemahaman tentang sistem politik, kemampuan untuk membuat keputusan yang baik, berkomunikasi secara efektif, serta mempengaruhi kebijakan publik. Hal ini sangat penting untuk menghasilkan warga negara yang aktif dan berkontribusi terhadap perkembangan demokrasi yang sehat (Winarno, 2019).

Watak kewarganegaraan mencakup nilai dan sikap yang mendukung kedamaian sosial, seperti toleransi, keadilan, dan rasa tanggung jawab kepada komunitas. Dalam hal pendidikan politik, aspek ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang menyadari hak-hak mereka dan menghargai hak orang lain. Sikap-sikap ini berkontribusi pada pembangunan demokrasi yang berakhlak, di mana perbedaan pendapat bisa dikelola melalui dialog dan kesepakatan bersama.

Penerapan pendidikan politik yang berfokus pada kompetensi kewarganegaraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik. Dengan menggabungkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kewarganegaraan, masyarakat akan lebih mampu menghadapi tantangan demokrasi, seperti disinformasi dan polarisasi. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal dan non-formal menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat demokratis yang inklusif dan berpartisipasi.

## **2.8 Penelitian Terdahulu**

Berikut adalah beberapa Penelitian sejenis dan relevan yang mengkaji terkait Konsep Penerapan Nilai-Nilai Keislaman melalui Kaderisasi Pendidikan Politik, Diantaranya:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Luqman Adi Prasetyo (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Pendidikan Politik oleh Partai Politik Islam Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kabupaten Purbalingga. Penelitian menunjukkan bahwa partai-partai Islam seperti PPP, PBB, dan PKS di Kabupaten Purbalingga telah rutin melaksanakan pendidikan politik baik untuk anggotanya maupun untuk masyarakat umum. Beberapa kegiatan yang mereka adakan mencakup pelatihan politik untuk pemula, menengah, dan lanjut, pengajaran tentang cara mengurus jenazah, pelatihan sebelum menikah, pelatihan di bidang teknologi informasi, serta kegiatan tafsir. Mereka juga melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan operasi kecil yang bekerja sama dengan dokter di Purbalingga, serta kegiatan ekonomi yang meliputi pengelolaan usaha perikanan, orientasi partai, dan taklim rutin partai. Mereka juga berupaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih baru dalam dunia politik lewat pendidikan politik yang melibatkan kegiatan yang menarik minat dan bakat pemilih baru, seperti pelatihan desain grafis, pelatihan MS Office, aktivitas olahraga, kegiatan untuk pecinta alam, bergabung dengan organisasi sayap partai, pelatihan kepemimpinan dasar, dan kegiatan motivasi belajar untuk siswa. Oleh karena itu, peneliti menggunakan studi ini sebagai sumber referensi karena memberikan dasar untuk memahami konsep yang berkaitan, serta

menyusun kerangka kerja dalam mengembangkan penelitian yang lebih mendalam.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Permana (2022) dalam Penelitiannya yang berjudul Partai Politik dan Pendidikan Politik Studi Atas Pendidikan Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok Tahun 2014-2019. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PKS Kota Depok berhasil melaksanakan inisiatif pendidikan politik untuk mengantisipasi Pemilu Legislatif 2019 yang terbagi dalam dua jenis, yaitu pendidikan politik untuk kader dan pendidikan politik untuk masyarakat. Pendidikan politik untuk kader meliputi, pertama, UPA (Unit Pembinaan Anggota), yang sebelumnya disebut liqo, yang merupakan inisiatif pendidikan politik yang menampilkan berbagai program di luar tema-tema politik. Kedua, Bedah Dapil. Bedah Dapil berfokus pada upaya untuk melihat dan menjawab tantangan yang menyoroti kelemahan PKS di daerah pemilihan tertentu di Kota Depok. Ketiga, Kembara (Kemah Bakti Nusantara). Kembara merupakan sebuah inisiatif yang bisa bersifat politis maupun sosial. Sebaliknya, pendidikan politik untuk masyarakat terdiri dari, pertama, Training Orientasi Partai (TOP). TOP merupakan program pendidikan politik di mana para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman dan sumber daya yang berkaitan dengan politik, tetapi juga garis besar visi, misi, dan program-program PKS yang dirancang untuk mereka yang ingin bergabung dengan PKS Kota Depok. Kedua, penyebaran pendidikan politik ditingkatkan melalui sosialisasi politik melalui kegiatan-kegiatan seperti majelis taklim dan acara-acara komunal lainnya. Ketiga, interaksi dengan pimpinan PKS. Penelitian ini menjadi referensi Penting karena membahas terkait pendidikan politik di masyarakat yang berhasil dan berdampak pada elektabilitas Partai pada Pemilu.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Aswan Jaya (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Nilai-Nilai Islam Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 di tinjau dari Perspektif Komunikasi Islam. Hasil

penelitian tersebut ialah Diskusi tentang berbagai isu negara dan masyarakat yang terlihat Dalam perspektif umum dari Fraksi PPP dan Fraksi PKS selama tahun 2013, tekad kedua partai untuk mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam semua analisis, masukan, dan rekomendasi politik mereka belum sepenuhnya tampak. Namun, semua isu yang diangkat dalam Rapat Paripurna selama tahun 2013, panduan dan solusinya bisa ditemukan dalam Al Qur'an dan Hadist. Walaupun begitu, masih ada nilai-nilai keagamaan dalam Naskah Pemandangan Umum dari Fraksi PPP dan Fraksi PKS jika dilihat dari dua perspektif. Pertama, ada beberapa kata atau kalimat yang menggunakan istilah keagamaan seperti: frasa "Bismillahirrahmanirrahim," "Assalamu'alaikum Wr.Wb.," ungkapan terima kasih kepada Allah SWT, ungkapan shalawat untuk Rasulullah SAW, pesan silaturrahim, istilah "Muhammad," istilah "Anugerah dari Allah SWT," ungkapan permohonan maaf atas kesalahan, istilah doa, "Amin," "Nauzubillah Summa Nauzubillah," serta penggunaan kata "taufik" dan "hidayah.". Kedua, pandangan, saran, dan rekomendasi dari kedua kelompok tersebut masih menunjukkan dukungan untuk kepentingan umat Islam dengan merangkum berbagai isu dan harapan masyarakat. Namun, cara penyelesaian dan masukan yang disampaikan masih sangat terasa bahwa kedua kelompok itu terjebak dalam dinamika Rapat Paripurna. Ketidakpastian dalam mengedepankan nilai-nilai Islam menjadi salah satu alasan mengapa PPP dan PKS belum jadi pilihan utama bagi banyak umat Islam di Sumatera Utara khususnya dan di Indonesia secara umum. Maka tidak heran jika dalam Pemilu 2014, PPP dan PKS mengalami penurunan yang berarti dalam jumlah suara dan kursi di DPR. Studi ini berfungsi sebagai rujukan yang peneliti gunakan mengenai penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks politik di lembaga legislatif.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Yohana Oktaviani Lavan, dkk (2021) dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Islam dalam Dinamika Politik Indonesia. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Politik Islam telah berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman kerajaan hingga sekarang di era reformasi. Dalam

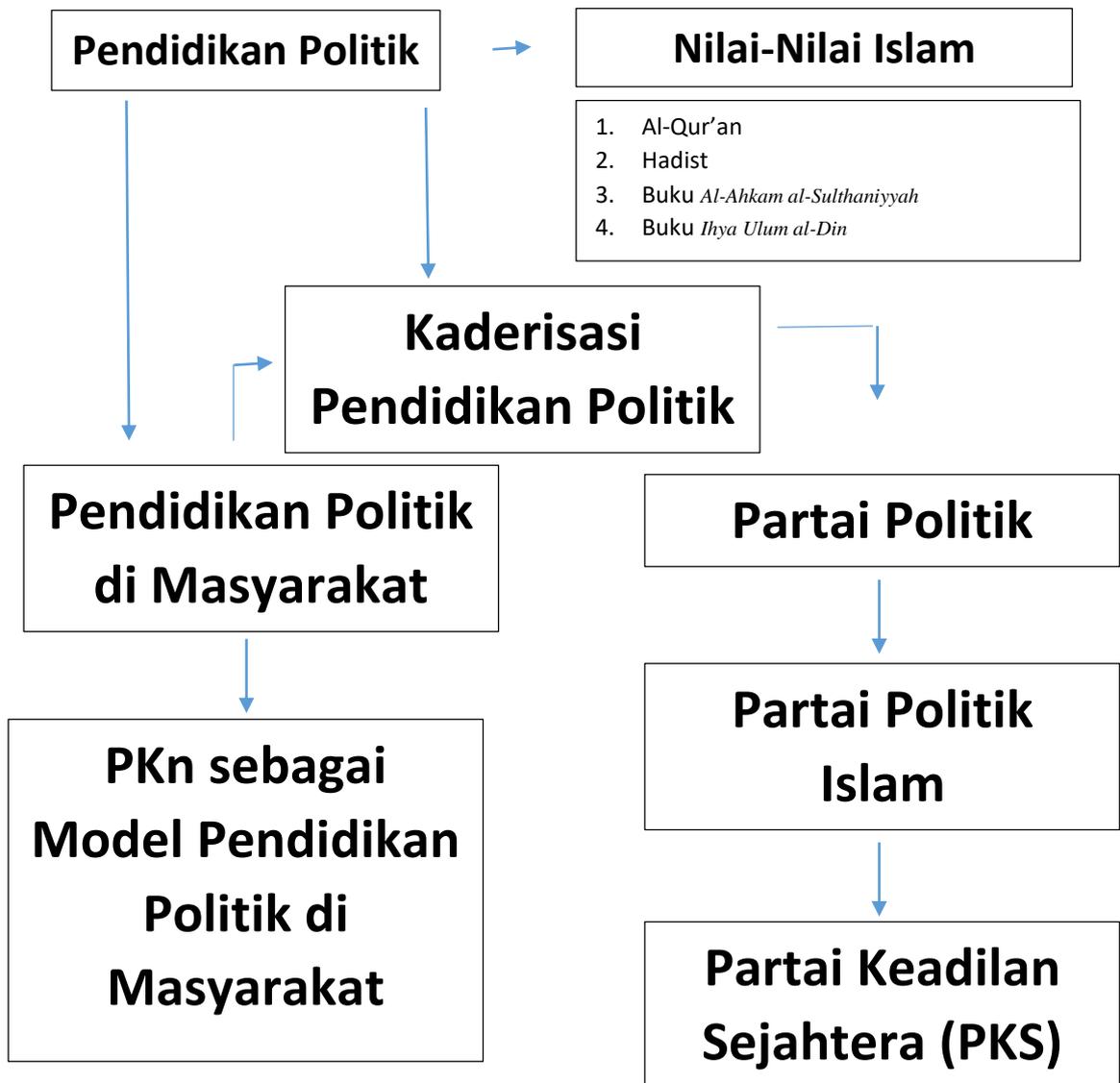
praktiknya, prinsip-prinsip Islam menjadi faktor yang memengaruhi politik di Indonesia, baik pada sikap individu maupun kelompok dalam aktivitas politik. Hal ini terlihat dalam lima sila yang terdapat dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai Islami. Namun, cara penerapan nilai-nilai tersebut dalam politik tergantung pada bagaimana kekuatan yang memengaruhi proses politik itu sendiri. Oleh karena itu, umat Muslim seharusnya menjadi kekuatan tersebut dengan menumbuhkan sikap dan perilaku politik yang sejalan dengan nilai-nilai Islam seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadis. Selain itu, dibutuhkan berbagai pendekatan agar pembangunan dan penerapan politik yang sesuai dengan ajaran agama Islam dapat tercapai. Penelitian ini menjadi referensi dasar peneliti sebagai kerangka dasar untuk mendalami terkait penerapan nilai-nilai Islam.

## **2.9 Kerangka Pemikiran**

Penanaman nilai-nilai keislaman melalui kaderisasi pendidikan politik di masyarakat adalah langkah strategis untuk menciptakan generasi yang memiliki integritas, karakter Islami, dan dapat berkontribusi dalam sistem politik demokratis. Dalam pandangan Islam, politik dianggap sebagai bagian penting dari kehidupan yang bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan umat (*masalahah*). Dengan kaderisasi pendidikan politik, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dapat ditanamkan sejak awal kepada individu di dalam komunitas. Proses ini tidak hanya berfokus pada penciptaan pemimpin politik, tetapi juga pada pembentukan masyarakat yang mengerti dan melaksanakan peran politiknya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Metode kaderisasi pendidikan politik yang berlandaskan nilai keislaman melibatkan pendekatan menyeluruh, termasuk pengajaran langsung, praktik sosial, dan pengembangan berbasis komunitas. Kegiatan seperti diskusi keagamaan, pelatihan kepemimpinan Islami, serta simulasi politik berbasis *syariah* dapat membantu peserta memahami hubungan antara nilai-nilai Islam dan praktik politik modern. Dengan cara ini, individu dilatih untuk berpikir kritis dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai keislaman ketika menghadapi berbagai isu politik di masyarakat.

Berikut peneliti sajikan kerangka penelitian pada gambar berikut ini:



**Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran**  
*Sumber: Data diolah Peneliti (2024)*